

**IMPLEMENTASI SOFT POWER RUSIA DALAM UPAYA ANEKSASI**

**KRIMEA TAHUN 2013-2014**

**SKRIPSI**



Oleh:

**EFRIDA HANNUM NASUTION**

19323115

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**IMPLEMENTASI SOFT POWER RUSIA DALAM UPAYA ANEKSASI**

**KRIMEA TAHUN 2013-2014**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**EFRIDA HANNUM NASUTION**

19323115



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI SOFT POWER RUSIA DALAM UPAYA ANEKSASI  
KRIMEA TAHUN 2013-2014**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana  
S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal,

**04 Oktober 2023**

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

**Dewan Penguji**

Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Gustri Eni Putri, S.IP., M.A

**Tanda Tangan**

*[Handwritten signatures of the exam board members]*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Rabu, 04 Oktober 2023*



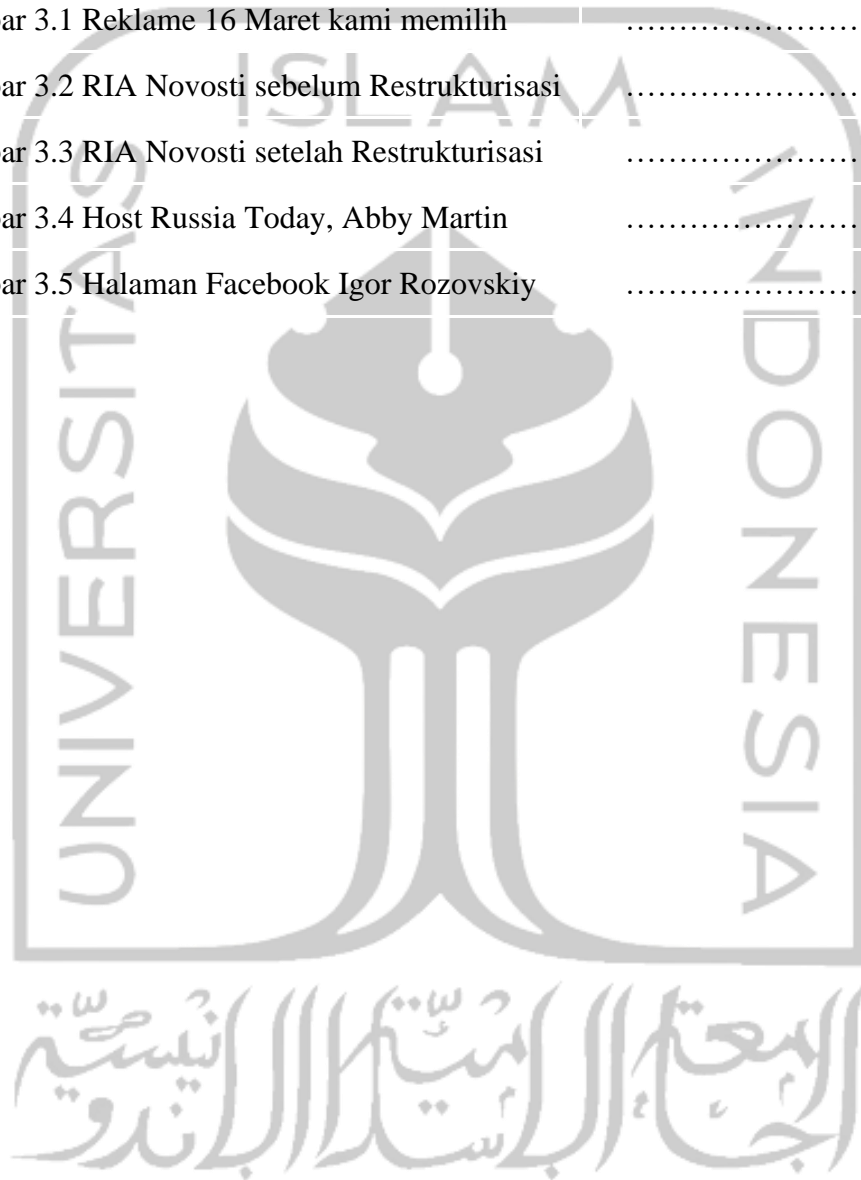
*Efrida Hannum Nasution*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka .....	6
1.6 Kerangka Pemikiran .....	9
1.7 Argumen Sementara.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	12
1.8.1 Jenis Penelitian .....	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	12
1.8.3 Metode Penelitian.....	12
1.8.4 Proses Penelitian .....	13
1.9 Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB 2 DINAMIKA KONFLIK PRA ANEKSASI KRIMEA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Krimea dalam geopolitik Rusia.....	15
2.2 Aneksasi Krimea dari Ukraina oleh Federasi Rusia 2013-2014.....	19
<b>BAB 3 IMPLEMENTASI SOFT POWER RUSIA .....</b>	<b>27</b>
3.1 Analisis penerapan Soft Power Rusia pada Aneksasi 2013-2014.....	27
3.1.1 Instrumen <i>Agenda Setting</i> .....	28
3.1.2 Instrumen <i>Attractions</i> .....	30
3.1.2.1 Budaya.....	31
A. Hegemoni Bahasa Rusia.....	33
B. Sejarah .....	33
C. Produk Teknologi .....	34
3.1.2.2 Nilai Nilai Politik.....	36
3.1.2.3 Kebijakan Luar Negeri.....	37
3.2 Propaganda Rusia di Krimea Pra-Aneksasi.....	39
1. Reklame referendum 16 Maret.....	40
2. Membungkam pers dan suara Independen .....	43
3. Distribusi paspor Rusia di Krimea .....	47
4. Media Sosial sebagai alat manipulasi Rusia .....	49
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Power	.....	10
Gambar 2.1 Peta Krimea	.....	18
Gambar 3.1 Reklame 16 Maret kami memilih	.....	41
Gambar 3.2 RIA Novosti sebelum Restrukturisasi	.....	44
Gambar 3.3 RIA Novosti setelah Restrukturisasi	.....	44
Gambar 3.4 Host Russia Today, Abby Martin	.....	46
Gambar 3.5 Halaman Facebook Igor Rozovski	.....	51

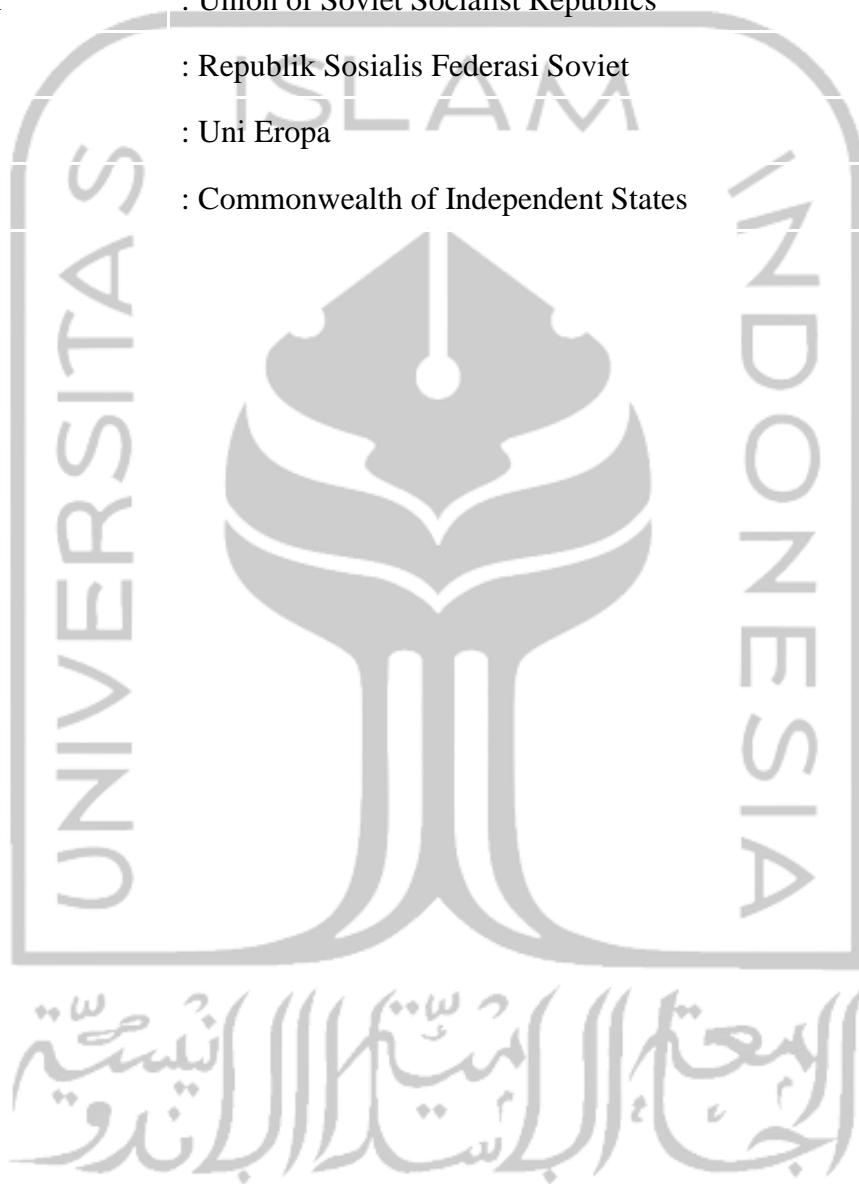


**DAFTAR TABEL**



## DAFTAR SINGKATAN

ARC	: Autonomous Republic of Crimea
USSR	: Union of Soviet Socialist Republics
RSFS	: Republik Sosialis Federasi Soviet
UE	: Uni Eropa
CIS	: Commonwealth of Independent States





## ABSTRAK

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Uni Soviet terbagi kedalam 15 negara yang mana Rusia dan Ukraina menjadi negara pecahan Uni Soviet yang seringkali bersitegang. Aneksasi Krimea dari Ukraina pada awal 2014 merupakan keputusan yang paling konsekuen selama 16 tahun kekuasaan Putin pasalnya aneksasi Krimea menjadi konflik internasional yang disorot masyarakat dunia karena dinilai sebagai pemicu sengketa Rusia Ukraina. Tulisan ini berfokus pada upaya Rusia dalam mengendalikan dan menginstrumentalisasi sumber-sumber soft power melalui instrumen *agenda setting* dan instrumen *attraction* yang dikemukakan oleh Joseph Nye Jr. Adapun instrumen *agenda setting* yang dilakukan Rusia seperti kegagalan agenda politik ukraina dalam penghapusan bahasa untuk menarik perhatian krimea, sedangkan instrumen *attraction* sendiri adalah perihal ketertarikan bagaimana Rusia melihat peluang terkait budaya, nilai nilai politik, juga kebijakan luar negerinya di Krimea sebagai strategi soft power nya pada aneksasi. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dan studi literatur seperti buku, jurnal, dan artikel surat kabar sebagai sumber pertama.

Kata Kunci: Soft Power, Legitimasi, Aneksasi.

After the collapse of the Soviet Union in 1991, the Soviet Union was divided into 15 countries, of which Russia and Ukraine were the most contentious. The annexation of Crimea from Ukraine in early 2014 was the most consequential decision during Putin's 16 years in power because the annexation of Crimea became an international conflict that was highlighted by the world community because it was considered as a trigger for the Russia Ukraine dispute. This paper focuses on Russia's efforts to control and instrumentalise soft power sources through *agenda setting* instruments and *attraction* instruments proposed by Joseph Nye Jr. The *agenda setting* instruments carried out by Russia such as the failure of the Ukrainian political agenda in the elimination of language to attract the attention of Crimea, while the *attraction* instrument itself is about how Russia sees opportunities related to culture, political values, as well as its foreign policy in Crimea as its soft power strategy in annexation. The method used is qualitative and literature studies such as books, journals, and newspaper articles as the first source.

Keywords: Soft Power, Legitimacy, Annexation.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Union of Soviet Socialist Republics (USSR) atau yang dikenal sebagai Uni Soviet resmi dinyatakan bubar pada tanggal 26 Desember 1991 yang mana pasca keruntuhannya Uni Soviet terbagi ke dalam 15 negara. Rusia dan Ukraina menjadi negara pecahan Uni Soviet yang sering sekali bersitegang yang mana aneksasi menjadi salah satu konflik yang disoroti dalam permasalahan Rusia-Ukraina. Namun, permasalahan Rusia-Ukraina sudah muncul setelah deklarasi yang diadakan pada pertengahan 1992, Komite Hubungan Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Eksternal diketuai oleh Vladimir Lukin pendiri partai demokrasi liberal Rusia Yabloko yang mengusulkan agar Soviet Tertinggi Rusia menyatakan keputusan tahun 1954 tidak sah dan tanpa kekuatan hukum. sepanjang 1992-1993 parlemen Rusia meningkatkan tuntutananya terhadap Krimea dan Sevastopol hingga membuat Duma dan Kementerian Luar Negeri menentang transfer Krimea ke Ukraina, yang menimbulkan protes keras dari Ukraina pada 23 Januari 1992 (Mizrokhi 2009, 8).

Aneksasi Krimea menjadi salah satu pemicu sengketa pasalnya Krimea dinilai masuk pada wilayah teritori Ukraina yang terletak di pesisir Laut Hitam. Namun, Krimea yang pada kepemimpinan Catherine The Great tahun 1783 lalu berada dibawah kekuasaan Rusia. Fakta Krimea pernah berada di bawah kekuasaan Rusia membuat Presiden Vladimir Putin menjadikan hal tersebut sebagai salah satu alasan untuk menganeksasi Semenanjung Krimea (Kartini 2014). Krimea memiliki

posisi yang sangat strategis dalam melindungi Rusia dari Kekaisaran Ottoman juga dilihat dari Rusia yang mampu bertahan dari infiltrasi militer asing karena AL Rusia yang berada tepat berbatasan dengan Laut Hitam. Dengan keinginan untuk menguasai pelabuhan Sevastopol yang sudah dikenal sebagai pelabuhan terbesar Uni Soviet sejak tahun 1783 tapi dialihkan ke Ukraina pasca runtuhnya Uni Soviet. Krimea yang ada pada kekuasaan Rusia di tahun 1783 tidak bertahan lama karena pada tahun 1954 Krimea jatuh dibawah kekuasaan Ukraina hal ini dilakukan perdana menteri Soviet Nikita Khrushchev untuk menunjukkan persatuan dan kerjasama kepada Ukraina diikuti dengan motif politik Khrushchev untuk memperkuat posisinya dalam hal perebutan kekuasaan (Mizrokhi 2009, 1).

Aneksasi ini dimulai pada pertengahan November 2013, Presiden Ukraina Viktor F. Yanukovich mengumumkan bahwa negara itu tidak akan menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa (UE) yang telah dinegosiasikan selama beberapa tahun. Presiden Yanukovich menyerah pada tekanan Rusia, yang datang dengan tawaran pinjaman \$15 miliar pasalnya pada saat itu sedang terjadinya krisis ekonomi di Ukraina. Meningkatnya gerakan Pro-Eropa yang menguat di Kiev yang mana gerakan protes dikenal sebagai Euromaidan karena pendukungnya menuntut hubungan yang lebih dekat dengan UE pun menyerukan Presiden Yanukovich untuk mundur karena dianggap tidak mampu memimpin Ukraina sebab Pro Rusia serta melakukan tindakan korupsi, Presiden Yanukovich akhirnya digulingkan dan menyebabkan Kiev mengalami kekosongan kekuasaan setelah Yanukovich melarikan diri ke Rusia melalui Krimea dengan beberapa rekan pejabat yang terikat dengan Rusia (Hopf 2016).

Tergulingnya Presiden Yanukovych ditengarai menjadi salah satu penyebab aneksasi Krimea oleh Rusia. Dan sejak saat Presiden Yanukovych tidak lagi menjadi Presiden Ukraina, Rusia kehilangan pemerintahan yang bersahabat diakibatkan presiden setelah Yanukovych dinilai tidak Pro terhadap Rusia, media yang tidak lagi ramah pemerintah Rusia hal ini membuat pemerintah Rusia mengutuk pemerintah Ukraina yang baru karena bertindak sebagai boneka kudeta yang didukung Uni Eropa atau AS. Uni Eropa dan AS sama-sama berjanji untuk mendukung pemerintah Ukraina yang baru, lebih lanjut memastikan rasa kehilangan Rusia dan terus menjadikan Ukraina sebagai medan pertempuran geopolitik antara Rusia dan Barat. Kericuhan yang terjadi membuat keadaan Krimea menggelar referendum untuk mempertanyakan masa depan Krimea dan mayoritas memilih untuk bergabung kembali kepada Federasi Rusia. 20 Februari 2014 tidak lama setelah referendum, Rusia mulai mengirim pasukan khusus ke Krimea. Rusia menjadi kelompok etnis terbesar sebelum kepergian Tatar hal tersebut pula yang dinilai memberi kemudahan karena Etnis Rusia turut mendukung pengembalian wilayah semenanjung itu ke teritori Rusia hingga pada 16 Maret 2014, Krimea resmi menjadi bagian Rusia meskipun setelah adanya referendum yang ditolak oleh AS dan negara Barat lainnya (Teper 2016).

Rusia terus diakui sebagai lingkup pengaruh dimana Moskow memiliki "kepentingan khusus". sebagian besar komentar tentang intervensi Rusia baru-baru ini di luar negeri terutama pada aneksasi Krimea Maret 2014, yang menilai Rusia lebih percaya diri menggunakan langkah langkah kekuatan keras untuk mengejar kepentingan lingkungannya namun, fokus yang berlebihan pada aspek-aspek Hard Power Rusia berisiko mengaburkan upaya Kremlin untuk mengembangkan Soft

Power. Konsep Soft Power telah mendapatkan daya tarik yang besar dalam beberapa tahun terakhir dalam lingkaran kebijakan luar negeri Rusia. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2006, Andrei Tsygankov menegaskan bahwa otoritas Rusia semakin menunjukkan kesiapan mereka untuk menggunakan soft power dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Tsygankov juga berargumentasi bahwa keasyikan Moskow untuk meningkatkan kehadiran soft power di negara-negara tetangga tidak boleh dilihat melalui prisma imperialisme, namun bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah bekas Uni Soviet (Tsygankov 2006).

Seperti negara lainnya, Rusia tidak akan melakukan upaya signifikan untuk memproyeksikan kekuasaan atas negara lain dalam hal ini Ukraina jika Rusia tidak berpedoman pada keyakinan kuat bahwa Rusia mempunyai kepentingan besar yang dipertaruhkan. Rusia memandang Ukraina sebagai bagian dari identitas dirinya didalam bekas pecahan Uni Soviet yang mana elit Rusia mempunyai keinginan untuk memulihkan Uni Soviet dan mereka memahami jelas bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan karena Rusia dan Ukraina kini adalah dua negara berdaulat dengan Ukraina yang menginginkan independen dari Rusia. Aneksasi yang dilakukan Rusia Terhadap Krimea menawarkan beberapa Fakta sejarah sebagai strategi Soft Power Rusia dalam menganeksasi Krimea seperti Gereja Ortodoks, Hegemoni Bahasa Rusia dan, Warisan Kekayaan Soviet. Otonomi Krimea dan terlebih lagi Sevastopol hampir secara universal dianggap sebagai tanah Rusia, hasil rampasan kemenangan militer Rusia pada akhir abad ke-18. Kota Sevastopol juga termasuk dalam wilayah Krimea, yang mana kota ini diduduki oleh penduduk Krimea dan juga oleh pemerintah Rusia karena Angkatan Laut Rusia berada disana.

Selain itu, kota ini memiliki mayoritas etnis Rusia dan juga mayoritas Kristen Ortodoks, yang merupakan agama dominan di Rusia. Dominasi Kristen Ortodoks juga menjadi salah satu pendukung kebijakan luar negeri Vladimir Putin dalam pendudukan Krimea dan juga dalam mendorong rakyat Krimea untuk mengadakan referendum disamping Bahasa Rusia sebagai alat penting untuk mempertahankan pengaruh Rusia di luar negeri. Ini adalah lingua franca bekas Uni Soviet dan merupakan “faktor pemersatu” bagi masyarakat di wilayah bekas Uni Soviet. Ikatan ini semakin kuat terutama di kalangan elit negara-negara bekas Soviet, yang sebagian besar belajar di Rusia di universitas yang sama, bekerja di institusi yang sama, atau bertugas bersama di tentara Soviet (Tsygankov 2013, 260) (Lankina and Niemczyk 2015).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Soft Power Rusia pada aneksasi Krimea tahun 2013-2014?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis konteks implementasi konsep soft power Rusia.
2. Untuk Menganalisis propaganda Soft Power Rusia dalam merebut kembali Krimea.

## **1.4 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini merupakan bagian dari lingkup kajian *Foreign Policy* di kawasan Eropa tepatnya di negara Rusia, Ukraina, dan Krimea. Adapun skop



penelitian ini akan berfokus mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Krimea dalam rentang tahun 2010-2020 dan akan direlevansikan dengan konsep Soft Power yang dibawa oleh Joseph Nye Jr guna membatasi makna dari soft power yang akan banyak disebutkan nantinya. Adapun alasan mengambil studi kasus aneksasi Krimea adalah karena blabla. Selain itu, penulis mengambil kurun waktu 2010-2020 adalah karena pengimplementasian soft power memakan waktu yang lama untuk diproses. juga seputar awal dimulainya dinamika konflik hingga terjadinya aneksasi Krimea dan hasil keputusan referendum nasib Krimea kembali ke ibu Rusia.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Biersack and O'Lear (2014) menyajikan alasan resmi pemerintah Rusia dalam mencaplok Krimea di "barat" dan menunjukkan bahwa upaya ini juga mencerminkan pergeseran yang terjadi secara bersamaan ke "timur." Aneksasi itu dipicu oleh peristiwa Euromaidan dan "berpalingnya" negara Ukraina dari hubungan yang lebih dekat dengan Rusia menuju Uni Eropa. Rusia menanggapi dengan terlibat dalam kampanye multifaset untuk merebut Krimea dengan mengajukan kebutuhan untuk membela orang-orang Rusia dan penutur bahasa Rusia yang didefinisikan secara samar-samar dari ancaman Ukraina yang sebagian besar fiktif di tengah konteks identitas, nasionalisme, dan keterikatan mitologis ke semenanjung. Bagian dari narasi ini termasuk pemerintah Rusia, terutama melalui kata-kata Presiden Putin, yang menciptakan struktur diskursif bercabang tiga dan saling terkait. Pertama, Putin mengklaim bahwa Krimea selalu bersama Rusia dengan memanfaatkan kenangan masa lalu yang sangat disederhanakan untuk

keuntungan geopolitik. Selanjutnya, Rusia menegaskan bahwa penduduk Krimea tidak mendukung pemerintah baru di Kyiv dan berada di bawah ancaman dari "fasis" ini karena kembali dimaksudkan untuk membangkitkan nostalgia Soviet untuk Perang Dunia Kedua. Narasi ketiga menekankan bahwa Krimea lokal pada dasarnya bertanggung jawab untuk memisahkan diri dari Ukraina dan menjadi bagian dari Federasi Rusia. Pasukan bertopeng tanpa lencana dan menggunakan peralatan militer Rusia terbaru yang menduduki semenanjung itu dikatakan penduduk setempat oleh pemerintah Rusia, tetapi semua tanda menunjukkan bahwa mereka adalah unit khusus negara Rusia – sesuatu yang akhirnya diakui oleh Presiden Putin. Penelitian tersebut telah menyajikan terkait langkah yang diambil oleh Rusia sebagai langkah soft power yang dipakai oleh Rusia dalam aneksasi Krimea 2014 namun kurang menyajikan bagaimana Rusia menerapkan langkah tersebut kedalam aksi yang nyata.

Kartini (2014) menyajikan uraian aneksasi Rusia di Krimea dan konsekuensi bagi Ukraina yang mana untuk membuat kerusuhan akibat aneksasi Krimea dibuatlah perjanjian antara Rusia, Ukraina, AS, juga Uni Eropa di Jenewa. Meskipun perjanjian tersebut tidak cukup membuat keadaan mereda namun hal tersebut dinilai menjadi langkah yang bagus bagi Rusia dan Ukraina karena secara tidak langsung White House dan Kremlin berusaha menghindari memburuknya situasi Regional. Yang mana pada artikel ini pula menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Krimea menyetujui untuk bergabung kembali bersama Federasi Rusia dimana 96,77% pemilih Rusia mendukung penggabungan Krimea dengan Rusia. Artikel ini kurang menyajikan bagaimana strategi soft power yang dilakukan Rusia agar dapat meyakinkan Krimea untuk bergabung dibawah kekuasaan Rusia kembali



hingga berhasil mendapatkan 96.77% suara yang memilih kembali bergabung kepada Rusia.

Salushev (2014) menyajikan rasionalisasi dan sikap objektif daripada Aneksasi Krimea itu sendiri yang mana tindakan Rusia di semenanjung itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan harus dikutuk. Namun demikian, hanya analisis yang cermat dan terinformasi tentang kudeta politik yang menggulingkan pemerintah Yanukovych dan keakraban dengan sejarah Krimea yang dapat menerangi pemahaman seseorang tentang penyebab keputusan wilayah itu untuk melepaskan diri dari otoritas Ukraina dan bersatu kembali dengan Rusia. Jauh dari spekulasi para pakar dan analisis hubungan internasional, yang mengklaim kedatangan tatanan dunia baru, peristiwa yang terjadi di Krimea menggambarkan bukti menyedihkan dari kegigihan tatanan dunia lama, di mana kepentingan nasional rabun berulang kali diprioritaskan daripada sejarah regional yang rumit dan aliansi politik yang rumit bahwasanya tindakan Rusia di Krimea bukanlah bagian dari siasat geopolitik untuk memperlebar kendali Rusia atas Eropa dan meningkatkan profil globalnya sebagai kekuatan super yang baru lahir. Aneksasi Rusia atas Krimea harus dipahami dalam konteks hubungan historis yang kuat antara orang-orang Rusia dengan semenanjung itu dan politik nasionalis Ukraina yang mengasingkan komunitas etnis Rusia di negara itu dengan demikian, tidak mengherankan bahwa rakyat Krimea mengambil keuntungan dari kudeta di Kiev dan memilih untuk bersatu kembali dengan Rusia. Namun, masa depan ekonomi dan politik Krimea di masa depan pada pemerintahan Rusia sangat tidak pasti. Artikel ini kurang menyajikan propaganda apa saja yang dilakukan Rusia dalam strategi soft power untuk meyakinkan Krimea kembali ke Rusia adalah

suatu hal yang membuat aman bagi etnis Rusia dan rekan Sovietnya yang terancam penghapusan bahasa.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

### Konsep Soft Power

Berbeda dengan stereotip Rusia yang tersebar luas secara internasional sebagai kekuatan revisionis di *High North*, skripsi ini berpendapat bahwa Moskow mencoba mengejar strategi dua sisi untuk wilayah tersebut yang membuat penulis mencoba melihat strategi soft power Rusia dalam aneksasi Krimea. Berbicara mengenai konsep soft power, Nye mengemukakan soft power sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments*” Dari definisi tersebut soft power adalah tentang memobilisasi kerja sama dari orang lain melalui daya tarik tanpa ancaman atau pembayaran (Nye 2004).

Hard dan soft power memiliki ketertarikan karena keduanya merupakan aspek kemampuan untuk mencapai tujuan seseorang dengan mempengaruhi perilaku orang lain. Perbedaan diantara keduanya dapat diidentifikasi melalui garis spektrum perilaku yang mana Hard Power biasanya dikaitkan dengan perilaku komando atau perintah sedangkan sumber daya soft power cenderung dikaitkan dengan ujung garis dari spektrum perilaku yaitu menggunakan kooptasi, dengan Soft Power melalui *agenda setting* dan *attraction* sebagai spektrum perilaku yang mana terdapat *resources* yang menghasilkan Soft Power dari nilai nilai yang diekspresikan (Nye 2004):

1. *Agenda Setting*, dengan *resources* yang mencakup *institutions*.

2. *Attractions*, dengan *resources* yang mencakup budaya, nilai nilai politik, dan kebijakan luar negerinya.

Gambar 1.1 Power

	Hard	Soft
Spectrum of Behaviors	Command ← coercion inducement	agenda setting attraction → Co-opt
Most Likely Resources	force sanctions payments bribes	institutions values culture policies

(Nye, 2014)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas (Nye 2004) menggambarkan spektrum kerja sama atau spektrum kooptasi yang menjadi hasil ujung spektrum Soft Power yang mana kooptasi muncul dari spektrum perilaku seperti *agenda setting* dan *attraction* lalu terdapat *institutions*, budaya, nilai nilai politik dan kebijakan luar negerinya. Rusia memiliki Soft Power yang cukup besar di Krimea, berdasarkan ikatan historis, budaya, hegemoni bahasa Rusia, gereja Ortodoks, hingga warisan kekayaan soviet sebagai salah satu lingkup pengaruh Rusia di Krimea dengan nilai *attraction* pada spektrum perilaku yang menjadi komponen yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan soft power karena, suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan soft power bila memiliki nilai *attraction*. Sejumlah cendekiawan, analis kebijakan luar negeri, dan tokoh politik Rusia (Tsygankov 2006) telah mengakui pentingnya Soft Power secara strategis dalam beberapa konteks kompleksnya jaringan aktor, institusi, dan norma yang membentuk kebijakan luar negeri, para ahli teori Rusia salah satunya Tsygankov percaya bahwa

ada juga dimensi ekonomi dalam soft power, meskipun hal ini juga dapat secara efektif berfungsi sebagai instrumen hard power (Nye 2004).

Strategi soft power Rusia merupakan tema yang relatif baru dalam literatur akademis dan masih kurang diteliti. Beberapa kategori yang membahas topik ini dapat diidentifikasi. Salah satunya, beberapa penelitian terutama yang bersifat historis, berfokus pada dugaan kesinambungan strategi soft power Rusia saat ini dengan propaganda tipe Soviet atau bahkan kebijakan luar negeri pra-revolusioner Rusia. Meski pemahaman Soft Power Rusia berbeda dengan konseptualisasi Nye karena lebih mirip dengan propaganda Soviet namun Nye pada mengatakan pada “Joseph Nye on the Future of Soft Power and Public Diplomacy” bahwasanya propaganda terbaik bukanlah propaganda (USC Annenberg 2019).

### **1.7 Argumen Sementara**

Tindakan membangun kepercayaan dan loyalitas antara penduduk lokal Krimea dan Rusia sekaligus mengalihkan persepsi kepentingan dan loyalitas bersama dari Ukraina dilakukan Rusia dengan mengacu pada ketentuan doktrin militer Rusia dan piagam PBB dalam penegasan kembali niat Rusia dalam aneksasi Krimea adalah untuk melindungi rekan senegaranya di luar negeri. Putin sebagai presiden Rusia terang terangan mengatakan Rusia tidak punya pilihan lain selain campur tangan dalam urusan Krimea dari ancaman Ukraina terhadap etnis Rusia di Ukraina dan ancaman terhadap masyarakat berbahasa Rusia di Ukraina.

Menggunakan ortodoksi, sejarah masa lalu, hegemoni bahasa Rusia, serta kenangan soviet sebagai elemen soft power Rusia yang dituangkan pada instrumen *agenda setting* dan *attraction* yang mana Rusia menggunakan penghapusan bahasa

oleh Ukraina sebagai agenda politik dalam menggagalkan agenda politik Ukraina. *Attraction* sendiri dikemukakan oleh Nye sebagai ketertarikan dalam budaya, nilai nilai politik, dan kebijakan luar negerinya yang mana pada budaya Rusia mengandalkan sejarah masa lalu, hegemoni bahasa, teknologi. Nilai nilai politik rusia tergambar melalui hadirnya *little green men*, dan kebijakan luar negerinya melalui Ortodoksi.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan metode studi pustaka sesuai dengan topik yang diteliti. Metode studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan topik yang akan ditinjau yakni upaya *soft power* Rusia dalam aneksasi Krimea.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Dalam penelitian ini subjek yang menjadi pembahasan penelitian adalah Rusia dan Ukraina sebagai negara yang sedang mengalami isu tersebut. Objek penelitian ini adalah Krimea karena wilayah tersebut yang menjadi perebutan.

### *1.8.3 Metode Penelitian*

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian menghasilkan sumber data yang sifatnya sekunder. Yang nantinya didapatkan melalui pencarian sumber rujukan yang mengarah kepada kebijakan Rusia-Ukraina secara Umum lalu mengecil ke

dalam kasus aneksasi Krimea dalam bentuk jurnal, buku, serta informasi dari dokumen atau literatur resmi.

#### 1.8.4 Proses Penelitian

Hal pertama yang akan dilakukan yakni mengumpulkan data-data terkait topik tersebut lalu kedua data akan dianalisis dengan membaca dan memahami ide umum. Ketiga dilanjutkan dengan mengkategorisasi hal menjadi sub bab. Keempat mengembangkan narasi atau deskriptif. Kelima memasukan unsur kritik dan analisis.

### 1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, diawali dengan Bab 1 yang berisi tentang Pendahuluan. Bab 2 yang membahas Kajian dan Sumber yang menjawab Rumusan Masalah. di Bab 3 berisi keterkaitan Konsep dengan Topik yang dibawa. Sedangkan pada Bab 4 akan berisi kesimpulan penelitian berupa inti kesimpulan dan juga Rekomendasi. Berikut adalah rincian penelitian pada tiap babnya:

- Pada Bab Satu, Menjelaskan tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Cakupan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Argumen Sementara, dan Metode Penelitian.
- Pada Bab Dua, Membahas Krimea dalam Imajinasi geopolitik Rusia dari segi catatan sejarah, *timeline* peristiwa pada saat terjadinya Aneksasi Krimea, dan propaganda Rusia dalam pengimplementasian soft power pada saat sebelum dan sesudah aneksasi. Yang mana pada bab ini akan menjadi sebuah pengantar dalam pengaplikasian teori yang akan dijelaskan pada bab tiga.

- Pada Bab Tiga, Menganalisis Konsep Soft Power yang dikenalkan oleh peneliti asal Rusia bernama Andrei P. Tsygankov .
- Pada Bab Empat, akan berisi Kesimpulan dan Rekomendasi terkait pengembangan Topik yang dapat dibawa dimasa yang akan datang.





## BAB 2

### DINAMIKA KONFLIK PRA ANEKSASI KRIMEA

#### 2.1 Krimea dalam geopolitik Rusia.

Krimea adalah sebuah wilayah yang memiliki 4,3% wilayah dari total keseluruhan di Ukraina bagian selatan. Negara dan Kekaisaran seperti Yunani, Bulgaria, Skit, Romawi, Got, Hun, Khazar, Kievan Rus, Kekaisaran Bizantium, Venesia, Genua, Kipchaks, Gerombolan Emas Mongol, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, Russia Soviet, Uni Soviet, Jerman, lagi-lagi Uni Soviet, hingga setelah runtuhnya Uni Soviet Krimea diberikan pada Ukraina, Krimea menjadi wilayah yang banyak diperintah oleh negara dan kekaisaran sejak zaman Yunani Kuno (Bebler 2015, 191).

Kedekatan Rusia dengan Krimea baik secara Identitas juga militer berawal ketika Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic atau Republik Otonomi Sosialis Soviet Krimea pada Oktober 1921 diawali dengan pecahnya revolusi Bolshevik pada tahun 1917 jatuh ke dalam bagian Republik Sosialis Federasi Soviet (RSFS) Rusia di dalam Uni Soviet hingga Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 lebih dari 200 tahun (Estévez 2022, 2). Bahkan jauh sebelum Aneksasi Krimea oleh Rusia di tahun 2014 lalu, Rusia pun pernah menganeksasi Krimea pada bulan April 1783 melalui kemenangannya melawan kekaisaran Ottoman yang menjadikan Krimea sebagai Kegubernuran Taurida (Bebler 2015, 191).

Tepat setahun setelahnya pada 1922 Krimea masuk menjadi bagian Uni Soviet dan tetap menjadi bagian RSFS Rusia hingga akhirnya pada 1954 Perdana Menteri Soviet memberikan Krimea sebagai hadiah dengan didorong oleh politik



Kruschev yang ingin memperkuat posisinya dalam perebutan kekuasaan yang terjadi tepat setelah kematian Joseph Stalin Kepala negara Uni Soviet kala itu (Popovici 2022). Atas campur tangan Nikita Khrushchev Oblast Krimea dari RSFS Rusia akhirnya menjadi bagian RSK Ukraine dan dimuat pada surat kabar resmi soviet di Pravda pada 27 Februari 1954. Surat kabar tersebut berisi:

*"Decree of the Presidium of the USSR Supreme Soviet transferring Crimea Province from the Russian Republic to the Ukraine Republic, taking into account the integral character of the economy, the territorial proximity and the close economic ties between Crimea Province and the Ukraine Republic, and approving the joint presentation of the Presidium of the Russian Republic Supreme Soviet and the Presidium of the Ukraine Republic Supreme Soviet on the transfer of Crimea Province from the Russian Republic to the Ukraine Republic." (Calamur 2014)*

Pemberian hadiah berupa Krimea ke Ukraina pun sebagai isyarat persaudaraan (*Treaty of Pereyaslav*) simbolis tanda peringatan 300 tahun bergabungnya Ukraina dengan kekaisaran Rusia yang dengan senang hati Kruschev berikan dan tidak terpikirkan bahwa 40 tahun yang akan datang Uni Soviet akan runtuh dan membuat ketegangan bagi kedua negara pecahan Uni Soviet yaitu Ukraina dan Rusia (Bebler 2015, 192).

Perubahan status Krimea terus berlanjut, Pada proses pembubaran Uni Soviet pada 1990-1991. Setelah referendum pada Februari 1991, Oblast Krimea ditingkatkan lagi statusnya menjadi republik otonom, dan tetap di dalam Ukraina. Pada musim panas 1991, upaya kudeta melawan Mikhail Gorbachev atau era reformasi Gorbachev (1984 - 1991) terjadi di Krimea, beberapa gerakan politik

(pro-Ukraina, komunis, dan pro-Rusia) mulai tumbuh di Krimea dan bertransformasi dalam partai politik yang menuntut restorasi otonomi Krimea dan kemudian menuntut dilakukannya referendum regional mengenai status semenanjung untuk bergabung dengan referendum nasional mengenai masa depan Ukraina pada 1 Desember 1991. Inilah yang menunjukkan untuk pertama kalinya Partai Komunis Krimea mulai memobilisasi opini publik untuk mendukung “penentuan nasib sendiri” (*self determination*) Krimea (Solchanyk 1994, 50).

Pada Kongres XXVIII bulan Juni 1990, Sekretaris Partai Komunis Ukraina Vladimir Antonovich Ivashko, memberikan lampu hijau untuk otonomi Krimea, dengan alasan bahwa orang-orang Krimea sendiri yang seharusnya memiliki keputusan akhir dalam masalah tersebut. Namun, karena pada tahun 1991 Ukraina telah melepaskan diri dari Uni Soviet maka Krimea dengan sendirinya menjadi bagian dari Ukraina. Dalam hal ini, Krimea tidak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena hak menentukan nasibnya sendiri hanya berlaku untuk negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Sedangkan, status Krimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina (Solchanyk 1994, 51).

Referendum kemerdekaan Ukraina pada 2 Desember 1991 benar-benar menentukan nasib Uni Soviet. Pada referendum terakhir, penduduk Republik Otonomi Krimea tidak dikonsultasikan apakah ingin tetap tinggal di Ukraina setelah bubarnya Uni Soviet atau bergabung kembali dengan Federasi Rusia. Uni Soviet dibubarkan pada 8 Desember 1991 pada pertemuan para kepala Federasi Rusia, Ukraina dan Belarus. Pada pertemuan di tempat berburu Belovezhskaya Pushcha itu, pemimpin Rusia Boris Yeltsin gagal meminta rekan Ukrainanya, Leonid

Kravchuk, kembalinya Krimea ke "ibu" Rusia. Sejak bubarnya Uni Soviet, hubungan politik antara Ukraina dan Rusia mengalami banyak masalah. Hal tersebut berkaitan dengan status Krimea, pembagian Armada Laut Hitam Soviet, hak mendaras Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, penggunaan fasilitas militer Rusia di Krimea, dan jumlah dan status personil militer Rusia di wilayah Ukraina (Bebler 2015, 194).

Gambar 2.1 Peta Krimea



(BBC News Indonesia 2018)

Bila ditinjau dari wilayahnya Krimea memiliki posisi yang strategis, Krimea sendiri memisahkan laut Azov dari laut Hitam yang mana Krimea memberikan dampak yang sangat signifikan bagi militer Rusia juga membuat kekuatan dunia menginginkan kontrol atas wilayah maritim (BBC News Indonesia 2018). Hingga setelah referendum 16 Maret Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada pemerintah Rusia pada 19 Maret 2014 untuk memulai persiapan pembangunan jembatan yang menghubungkan Wilayah Krasnodar Rusia selatan langsung dengan Krimea. Putin mengatakan jembatan di atas Selat Kerch, yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Azov, harus sesuai untuk lalu lintas jalan raya dan kereta api.

Menteri Transportasi Maxim Sokolov mengatakan beberapa proyek jembatan ke semenanjung Laut Hitam yang akan melewati daratan Ukraina akan siap pada akhir 2014. Namun hal ini tidak terjadi (“Autonomous Republic of Crimea” n.d.). Runtuhnya Uni Soviet 1991 lalu membuat wilayahnya mewarisi senjata yang diproduksi dan disimpan selama perlombaan senjata nuklir, wilayah tersebut Ukraina, Rusia, Belarus, dan Kazakhstan. Hal ini terus berlanjut hingga terjadinya perjanjian pada 1997 yang memungkinkan Rusia menjaga laut hitamnya di Sevastopol (Minicozzi-Wheeland 2022).

## **2.2 Aneksasi Krimea dari Ukraina oleh Federasi Rusia 2013-2014.**

Pasca keruntuhan Uni Soviet, Rusia terus mengencangkan ikatan pengaruhnya atas negara-negara bekas pecahan Uni Soviet dengan tujuan mempertahankan kebesaran Rusia. Di bawah kepemimpinan Putin Integrasi Ekonomi dan Politik menjadi salah satu pendorong pengaruh Rusia bersama negara Post Soviet seperti halnya Uni Beacukai dengan Belarusia dan Kazakhstan. Tidak ketinggalan Uni Eurasia blok supranasional yang mengikuti Uni Eropa. Rusia terus mendesak negara bekas pecahan Uni Soviet untuk bergabung tidak terkecuali Ukraina yang bahkan diberi jaminan pinjaman bila turut serta bergabung dengan Uni Eurasia. Hal ini dilakukan Rusia dan ditegaskan oleh Putin bahwasanya blok ini tidak akan berarti dengan ketidakikutsertaan Ukraina di dalamnya (Bogomolov and Lytvynenko 2012).

Dalam perkembangannya diketahui presiden Ukraina sebagian besarnya lebih condong untuk turut bergabung ke dalam Uni Eropa salah satunya Presiden Viktor Yushchenko yang bahkan telah menandatangani perjanjian pra-keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2008, hingga akhirnya Presiden Viktor Yanukovich sebagai

Presiden Ukraina yang Pro Rusia menggantikannya bahkan sikap Pro Rusia Presiden Viktor Yanukovych terlihat pada 2 bulan setelah naik jabatan dengan menandatangani Kesepakatan Kharkiv pada 22 April 2010 lalu mengenai perpanjangan status pangkalan dan armada Laut Hitam di Sevastopol, Krimea. yang memungkinkan Rusia untuk menempatkan armadanya di Sevastopol hingga 2042 (Vahabov 2010, 301).

Setelah pergantian Periode dari Presiden Viktor Yushchenko ke Presiden Viktor Yanukovych kebijakan luar negeri Ukraina mengalami perubahan terutama pada bidang Ekonomi yang semula berkiblat ke arah Uni Eropa kini berpindah ke Rusia bahkan Ukraina juga telah menyetujui kerjasama dengan Rusia yang menawarkan pinjaman \$15 miliar dan memberi potongan harga pembelian gas dari Rusia. Pada 21 November 2013 Presiden Viktor Yanukovych yang Pro Rusia pun menengguhkan pembicaraan mengenai *Association Agreement* dengan Uni Eropa yang mana sejak 2012 lalu telah memulai negosiasi dengan Uni Eropa terkait penurunan hambatan perdagangan (Biersack and O'Lear 2014, 248).

Penangguhan pembicaraan mengenai *Association Agreement* dengan Uni Eropa menjadi penyebab langsung dari krisis Rusia dan Ukraina yaitu keputusan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych pada November 2013 untuk membatalkan penandatanganan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa. Sebaliknya, Yanukovych mengisyaratkan bahwa dia menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Krisis ini sudah sangat tertanam dalam identitas Ukraina dan Rusia, yang telah membagi Ukraina secara etnis dan politik antara Ukraina di bagian barat dan tengah negara itu, yang cenderung pro-Barat, etnis Rusia dan berbahasa Rusia. di timur dan selatan, yang memandang ke arah Federasi Rusia (Ambrosio 2016, 470).

Kebijakan ini menjadi pergolakan sosial dan politik yang jauh lebih besar di Ukraina, Membuat para kekuatan politik Pro Barat (disebut sebagai gerakan Euromaidan atau Eurosquare) menggunakan pembatalan ini untuk memulai Gerakan protes massa di Kyiv dan di tempat lain pada 21 November 2013, Protes Euromaidan, juga dikenal sebagai Revolusi Martabat, dinamai menurut Maidan Nezalezhnosti, atau Lapangan Kemerdekaan, di Kyiv, di mana sebagian besar demonstrasi berlangsung. Gelombang demonstrasi terus berlanjut, mencakup kota-kota lain dan penyebab yang lebih luas, termasuk protes terhadap dugaan korupsi pemerintah, kurangnya akuntabilitas juga karena tuntutan para pendukung Pro Barat menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan UE dan untuk menyerukan pemakzulan (pemecatan) Yanukovych dari jabatannya karena dinilai bertentangan dengan aspirasi rakyat Ukraina yang menginginkan integrasi dengan Eropa. Demonstrasi ini berubah menjadi kekerasan karena pemerintah berusaha untuk mengusir para pengunjung rasa, yang pada gilirannya melawan dengan kekerasan hingga akhirnya aksi tersebut menimbulkan jatuhnya korban akibat baku tembak dengan polisi Ukraina dan aksi anarkis yang terjadi (Biersack and O’Lear 2014, 248).

Situasi tiba-tiba berubah pada 22 Februari 2014 ketika Presiden Yanukovych dengan sekelompok pejabat tinggi Ukraina yang terkait erat dengan Rusia tiba-tiba melarikan diri dari ibu kota melalui Krimea ke Rusia dan pemerintahan baru dibentuk, berjanji untuk mereformasi Ukraina dan menandatangani Perjanjian Asosiasi Uni Eropa. Meskipun Yanukovych melarikan diri, tindakan pemakzulan parlemen tidak mengikuti prosedur yang benar, dan karenanya, beberapa tindakan pemerintah Ukraina secara teknis ilegal. Melanggar



prosedur pemakzulan yang diatur dalam Art. 111 Konstitusi Ukraina, parlemen dengan cepat memberhentikan Presiden Yanukovich dan menunjuk seorang Presiden sementara yaitu Arseniy Yatsenyuk (Bebler 2015, 195). Pengambilalihan negara oleh kelompok nasionalis anti Rusia, didukung secara terbuka oleh Barat membuat Rusia menanggapi sebagai hilangnya pemerintahan yang bersahabat dan justru memandang jika pemerintahan Arseniy Yatsenyuk merupakan bentuk “kudeta fasis” dan juga dilakukan secara ilegal. Rusia juga menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa mendanai revolusi Ukraina dan pemberhentian Viktor Yanukovich dilakukan secara ilegal. Oleh karena itu, Rusia masih menganggap Viktor Yanukovich sebagai Presiden Ukraina (Biersack and O’Lear 2014, 249).

Setelah pemberhentian presiden Viktor Yanukovich dari jabatannya Parlemen Ukraina terbaru yang datang dengan janji untuk mereformasi Ukraina dan menandatangani Perjanjian Asosiasi Uni Eropa, segera mengambil langkah pertama parlemen dengan mencabut undang undang bahasa kontroversial. Undang undang diberlakukan pada tahun 2012 tersebut tentang perizinan penggunaan resmi bahasa Rusia dan bahasa minoritas lainnya sebagai bahasa daerah, yang mengizinkan bahasa selain bahasa Ukraina untuk digunakan secara resmi di daerah dengan populasi minoritas lebih dari 10% populasi (Interfax-Ukraine 2012). pada tanggal 23 Februari 2014, setelah Verkhovna Rada (parlemen) menghapus undang-undang bahasa Ukraina tahun 2012 sebanyak 232 dari 334 suara (“Ukraina menghapuskan”), propagandis Rusia juga mengklaim secara tidak benar bahwa bahasa Rusia telah disingkirkan dari Ukraina, hal ini membuat beberapa daerah yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa daerah dan penduduk Rusia, yang

biasanya diberi label sebagai "rekan" Rusia ("sootchestvenniki"), berada di bawah ancaman serius (Moser 2013).

Di Krimea, yang memiliki populasi mayoritas etnis Rusia, peristiwa di seluruh Ukraina dipandang sebagai kudeta anti-Rusia yang ilegal. Bentrokan antara pro-Rusia dan pro-Ukraina pecah pada 26 Februari 2014 lalu. Segera setelah itu, pro-Rusia protes dimulai di Sevastopol dan dini hari pada tanggal 27 Februari 2014 kelompok bersenjata bertopeng menyita dan mengunci gedung-gedung pemerintah di Simferopol, termasuk gedung Dewan Tertinggi Krimea pasukan pro-Rusia mulai merebut lokasi strategis di seluruh semenanjung. Beberapa dari kelompok bertopeng tersebut dianggap sebagai pasukan Federasi Rusia yang beroperasi tanpa rencana. Pada tanggal 28 Februari 2014, sekelompok lebih dari 20 deputi mengajukan kepada Ketua Duma Negara Rusia sebuah rancangan amandemen undang-undang konstitusional tentang penerimaan subjek baru ke Federasi Rusia. Rancangan tersebut secara khusus membenarkan penggabungan bagian-bagian Ukraina ke dalam Federasi Rusia atas dasar dugaan diskriminasi Ukraina terhadap minoritas nasional. Sehari kemudian, Qurultay (Majelis) Tatar Krimea memberikan suara pada "Pelaksanaan Hak Rakyat Tatar Krimea untuk Menentukan Nasib Sendiri di Wilayah Sejarah mereka Krimea" Dengan 212 suara setuju, satu menentang dan empat abstain, diputuskan untuk memulai prosedur politik dan hukum untuk memulihkan otonomi teritorial nasional Tatar di Krimea. Parlemen regional dan dewan kota Sevastopol memutuskan untuk mengadakan referendum untuk memisahkan Krimea dari Ukraina (Bebler 2015, 195).

Pada 27 Februari 2014, pasukan Rusia tanpa lambang militer menyerbu Krimea. Sepanjang Februari, Rusia diam-diam meningkat kehadiran pasukannya di



semenanjung. Mereka memblokir bandara di Sevastopol dan Simferopol dan merebut gedung Parlemen Krimea. Mereka juga memblokir pangkalan militer Ukraina yang terletak di semenanjung. Pasukan Ukraina tidak menerima perintah untuk menembak pasukan Rusia. Tak lama kemudian, sekelompok politisi lokal pro-Rusia, yang dipimpin oleh pasukan Rusia, membongkar pemerintahan resmi di Krimea dan menyatakan Sergey Aksyonov, pemimpin Partai Persatuan Rusia yang marjinal, sebagai "perdana menteri Krimea" (Minicozzi-Wheeland 2022).

Setelah pemutusan penghapusan undang-undang membuat beberapa daerah yang menggunakan bahasa daerah selain bahasa Ukraina merasa berada dibawah ancaman serius, Setelah kesalahan itu, kepemimpinan baru Ukraina sayangnya memperburuk keadaan ketika tidak berhasil menyampaikan dengan cukup jelas kepada komunitas internasional bahwa undang-undang bahasa bermasalah tahun 2012 sebenarnya masih berlaku bahkan hingga hari ini, karena Presiden sementara Ukraina Oleksandr Turchynov memveto mosi untuk mencabut undang-undang bahasa sebagai isyarat "perdamaian" (Kramer 2014). Presiden Oleksandr Turchynov berjanji akan memveto undang-undang tentang bahasa minoritas nasional dengan menyatakan ini dalam pidatonya kepada orang Ukraina pada 2 maret 2014 malam:

*"In order to avoid provocation, today I convened a meeting of the heads of the parliamentary faction and group and clearly informed them that although **the law on language is unbalanced and unprofessionally prepared, I will not sign a parliamentary decision to repeal this law. until the working group, which will be voted on by Parliament tomorrow, new laws will not be prepared and voted on by the Council, which will provide***

*an opportunity for the development of all languages," (Pravda Ukraine 2014).*

Kemunculan pria berseragam hijau polos menjadi daya pikat misterius bagi Krimea karena sikap tenang dan sopan serta tidak adanya lencana, kehadiran yang disebut "*little green men*" sebuah istilah yang diciptakan oleh Krimea dan dengan cepat digunakan secara luas di media dan di Internet untuk pasukan Rusia berseragam tak bertanda. "Little green men" dianggap sebagai hal baik bagi Krimea yang saat itu mayoritas etnisnya Pro Rusia dan sedang berada dibawah tekanan penghapusan bahasa selain bahasa Ukraina untuk melindungi rakyat dari kekerasan yang akan datang yang akan dimulai oleh pemerintah baru Ukraina dan sekutunya (Shevchenko 2014).

Kekacauan dan ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan juga politik terus terjadi di Krimea. Oleh karena itulah, permintaan referendum penyatuan kembali Krimea dengan Federasi Rusia pada 27 Februari 2014, diadakan referendum tersebut pada tanggal 16 Maret 2014 (Bebler 2015, 197).

Dari hasil referendum yang dianggap tidak fair tersebut, Menurut pihak berwenang Krimea, 81,36 persen pemilih terdaftar mengambil bagian dalam referendum Krimea dan 96,77 persen memilih memisahkannya dari Ukraina dan bersatu kembali dengan Rusia. sekitar 96% pemilih di Krimea mendukung untuk bergabung dengan Rusia. Dari hasil tersebut, masyarakat ingin semenanjung Krimea tidak lagi bergabung dengan Ukraina, namun kembali bergabung dengan Federasi Rusia (VOA News 2014).

Pada 17 Maret 2014, Krimea mendeklarasikan kemerdekaannya dan meminta Federasi Rusia untuk bergabung. Dewan Kota Sevastopol meminta

pengakuan terpisah pelabuhan tersebut sebagai kota federal. Keesokan harinya, Putin menandatangani perjanjian akses dengan para pemimpin Krimea Pada 18 Maret 2014, sebuah perjanjian tentang incorporating Krimea dan Sevastopol ditandatangani di Moskow. Hanya dalam lima hari, "Hukum Konstitusi tentang penerimaan Republik Krimea ke Federasi Rusia dan Pendirian Entitas Konstituen Baru Republik Krimea dan Kota Kepentingan Federal Sevastopol" di dalam Federasi Rusia dengan cepat diajukan melalui Majelis Federal Rusia, ditandatangani oleh Presiden Rusia dan mulai berlaku (Bebler 2015, 198).



## BAB 3

### IMPLEMENTASI SOFT POWER RUSIA

#### 3.1 Analisis penerapan Soft Power Rusia pada Aneksasi 2013-2014.

Rusia menyatakan dirinya sebagai pelindung penutur bahasa Rusia yang tinggal di bekas Republik Soviet pada awal 1990-an. Rusia yang dikenal sebagai negara yang banyak menggunakan Hard Power dalam kebijakannya pada kenyataannya menggunakan berbagai mekanisme baik Hard Power dan Soft Power untuk mempengaruhi etnopolitik di negara-negara tersebut. Setelah Negara-negara Baltik memperoleh keanggotaan di NATO dan UE pada tahun 2004, Rusia mulai lebih menekankan pada mekanisme pengaruh yang “lebih lunak” dan lebih sedikit mengandalkan tuas militer dan ekonomi. Mekanisme “*Soft Power*” ini termasuk membangun hubungan dengan penutur bahasa Rusia melalui organisasi rekan senegarannya, mendukung prakarsa budaya dan pendidikan, dan menggunakan media Rusia untuk mempengaruhi opini publik (Schulze 2021, 1).

Menganalisis upaya Rusia dalam pengimplementasian Soft Power pada aneksasi Krimea dapat dilihat melalui instrumen perilaku yang dikemukakan oleh Nye bahwasanya soft power adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan kooptasi. Adapun untuk mencapai kooptasi itu sendiri (Nye 2004) berpendapat perlu adanya instrumen perilaku sebagai tolak ukur untuk sampai pada kooptasi yakni *Agenda Setting* dan *Attraction*. Maka dari itu penulis akan mencoba menganalisis Instrumen perilaku baik dalam *Agenda Setting* ataupun *Attraction* dalam melihat soft power yang dilakukan Rusia pada aneksasi Krimea.

### 3.1.1 Instrumen *Agenda Setting*.

Instrumen *agenda setting* sebagai salah satu spektrum perilaku untuk mencapai kooptasi dari konsep soft power merupakan kemampuan untuk memanipulasi agenda pilihan politik agar pihak lain gagal mengekspresikan suatu preferensi politik tertentu karena preferensi tersebut dianggap tidak realistis yang bersumber pada institusi. Institusi dapat berarti sesuatu yang dilembagakan oleh undang undang yang mana secara umum, institusi adalah lembaga yang menjadi aturan, mekanisme penegakan, dan organisasi. Pembangunan institusi bisa terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan anggota komunitas. Sedangkan organisasi dapat merujuk pada suatu kesatuan yang terdiri atas bagian bagian dalam perkumpulan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini negara dapat dikategorikan sebagai organisasi karena negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi dan menyatukan sebuah kelompok manusia yang nantinya disebut sebagai bangsa dan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan memiliki hak suatu kewibawaan yang dapat memaksakan kehendaknya terhadap orang orang yang didalam kelompok atau organisasi kekuasaan tersebut hal ini dikarenakan negara merupakan alat yang digunakan oleh sekelompok individu yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antar individu lainnya yang berada di dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah tersebut. Institusi sendiri merupakan sumber daya dari instrumen *agenda setting* melalui institusi suatu power dari sebuah negara dapat terlegitimasi dengan menampilkan daya tarik dan ideologi dari negara tersebut, apabila suatu negara membentuk peraturan yang sesuai dengan kepentingan negara tersebut serta nilai-nilainya, negara tersebut dapat dipercaya oleh negara lain sehingga bersedia untuk mengikuti negara tersebut (Nye 2004).

Salah satu tindakan pertama parlemen pasca-Yanukovych adalah mencabut undang-undang bahasa kontroversial yang diberlakukan pada 2012 yang mengizinkan penggunaan resmi bahasa Rusia dan bahasa minoritas lainnya sebagai bahasa daerah, yang mengizinkan bahasa selain bahasa Ukraina untuk digunakan secara resmi di wilayah dengan populasi minoritas lebih dari 10% dari populasi (Interfax-Ukraine 2012; Moser 2013). Banyak daerah dengan jumlah penutur bahasa Rusia yang tinggi dan kotamadya mengadopsi bahasa Rusia sebagai bahasa daerah; ancaman pencabutan undang-undang bahasa lebih lanjut berkontribusi pada representasi pemerintah Ukraina yang baru sebagai ancaman bagi penutur bahasa Rusia dan etnis Rusia di Ukraina, seperti di Krimea. Di Krimea, 77,0% menganggap bahasa Rusia sebagai bahasa ibu mereka. Tatar Krimea berada di urutan kedua dengan persentase 11,4%, dan Ukraina hanya menempati peringkat ketiga dengan persentase 10,1%. Krimea yang sebagian besarnya adalah Etnis Rusia yang berbahasa Rusia merasa berada dalam ancaman identitas atas agenda politik Ukraina yang ingin menghapuskan bahasa selain Ukraina di negara tersebut. Menggagalkan agenda politik penghapusan bahasa milik Ukraina sebagai respons yang dibuat terhadap kejatuhan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dari jabatannya, Rusia sebagai institusi negara yang menjalankan manipulasi agenda politik pada aneksasi Krimea menawarkan kembalinya Krimea ke Ibu negara Rusia dengan dalih melindungi rekan senegarannya disamping kepentingan Rusia yang ingin mencegah dua kemungkinan yang berbahaya: pertama, pemerintah baru Ukraina mungkin bergabung dengan NATO, dan kedua, Kiev mungkin akan mengusir Armada Laut Hitam Rusia dari pangkalannya yang sudah lama berdiri di Sevastopol (Treisman 2016).

Bergabungnya Krimea ke Rusia memberikan Krimea sebuah pembangunan institusi yang baru karena berpindahnya suatu “organisasi kekuasaan” dari Ukraina ke Rusia. Rusia adalah pihak yang bertindak, dan diubah menjadi salah satu penerima pasif, yang hanya menghormati pilihan penduduk Krimea untuk dipersatukan kembali dengan Rusia. Dalam deskripsi aneksasi mereka, beberapa penulis menekankan bahwa Krimea telah dianeksasi secara sukarela. Beberapa penulis mengklaim bukti dari Krimea bahwa orang senang dengan Rusia mengambil alih dan berbagi pengamatan dari perjalanan terakhir mereka di sana. Mantan Pustakawan Nasional Norwegia, Kirsten Engelstad, mencatat bahwa apa yang digambarkan di media Barat/Norwegia sebagai aneksasi, kebalikannya dengan anggapan penduduk lokal di Krimea yang menyebutnya sebagai “reuni” (Myhre, Aasland, and Holm-Hansen 2022, 12).

### **3.1.2 Instrumen *Attractions*.**

Kekuatan lunak suatu negara bila merujuk pada (Nye 2004) adalah kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain yang mana daya tarik menjadi komponen penting dalam melaksanakan Soft Power. Kepemimpinan tidak semudah mengeluarkan perintah namun memimpin dengan memberi contoh hingga menarik orang lain untuk menjalankan apa yang diinginkan, melalui *Attraction* kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa harus memaksa dan memerintah pihak lain apabila pandangan kita dianggap benar. Soft Power tidak melulu sama dengan pengaruh. Bagaimanapun juga, pengaruh juga dapat bertumpu pada Hard Power berupa ancaman atau pembayaran. Dan soft power lebih dari sekadar persuasi atau kemampuan untuk menggerakkan orang dengan argumen, meskipun itu adalah bagian penting dari soft power. Ini juga merupakan kemampuan untuk menarik, dan



daya tarik sering kali mengarah pada persetujuan. Sederhananya, dalam Instrument *Attraction*, soft power adalah daya tarik. Adapun daya tarik (*Attraction*) bertumpu pada tiga sumber daya: budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negerinya (Nye 2004).

### **3.1.2.1 Budaya.**

Budaya adalah seperangkat nilai dan praktik yang menciptakan makna bagi suatu masyarakat. Budaya memiliki banyak manifestasi yang umumnya merupakan instrumen utama dalam soft power yang berguna untuk meningkatkan *attraction* dan *influence* karena di dalamnya memuat kebebasan berekspresi, kreatifitas serta inovasi yang terikat dengan masyarakat. Ketika budaya suatu negara mencakup nilai-nilai universal dan kebijakannya mempromosikan nilai-nilai dan kepentingan yang dimiliki oleh orang lain, maka hal ini akan meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan karena adanya hubungan daya tarik dan kewajiban yang diciptakannya (Nye 2004).

Kebijakan Moskow terhadap “rekan senegaranya” secara longgar didefinisikan sebagai etnis Rusia (penutur bahasa Rusia, dan minoritas lain yang berbagi ikatan budaya, agama, atau sejarah dengan Rusia dan tinggal di luar negeri) diluncurkan pada 1990-an dan memperoleh momentum pada 2000-an di bawah kepemimpinan Rusia, Presiden Vladimir Putin. Di Ukraina, minat Moskow terhadap minoritas Rusia semakin intensif menyusul upaya Ukraina untuk beralih ke Barat dengan Revolusi Oranye 2004. Orang Rusia dan Ukraina telah hidup bersama dengan damai selama beberapa dekade: kawin campur, sebagian besar berbicara bahasa Rusia di



beberapa daerah, dan seringkali memiliki keyakinan yang sama. 'Rekan senegaranya' yang berarti minoritas Rusia di negara lain, merupakan pusat soft power Rusia di ruang pasca-Soviet, karena mereka adalah target utama organisasi soft power Rusia seperti Rossotrudnichestvo (Badan Federal untuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, Rekan yang Tinggal di Luar Negeri, dan Kerjasama Kemanusiaan Internasional)<sup>1</sup>. Menurut Kebijakan Negara Federasi Rusia 1999 terhadap Rekan yang Tinggal di Luar Negeri, 'rekan senegara' didefinisikan secara luas, termasuk orang Rusia yang tinggal di luar negeri, mantan warga negara Uni Soviet, imigran Rusia, keturunan rekan senegaranya, dan bahkan warga negara asing yang mengagumi budaya dan bahasa Rusia (Tafuro 2014).

Rusia memiliki sejumlah keuntungan untuk menerapkan strategi soft power di lingkungannya kehadiran minoritas Rusia yang besar, sejarah bersama, kedekatan budaya dan bahasa, ekonomi yang lebih besar dan sumber daya energi. Hal ini membuat Tsygankov peneliti asal Rusia memasukan Nilai budaya yang meliputi daya tarik linguistik yaitu hegemoni bahasa Rusia, sejarah, dan juga produk teknologi sebagai definisi yang lebih luas dari Nye (Tsygankov 2006).

#### **A. Hegemoni Bahasa Rusia**

Secara linguistik di pantai Laut Hitam, wilayah tersebut tidak diragukan lagi milik wilayah Ukraina di mana bahasa Rusia menonjol, meskipun selain Krimea tidak pernah ada mayoritas etnis Rusia di pantai

---

<sup>1</sup> Organisasi ini dibentuk segera setelah Revolusi Oranye pada tahun 2005 untuk mempromosikan bahasa, pendidikan, dan budaya Rusia di luar negeri.

Laut Hitam – baik selama masa Soviet maupun sejak kemerdekaan Ukraina. Ini berarti bahwa penduduk dengan “kewarganegaraan” Ukraina juga banyak menggunakan bahasa Rusia. Yang mana situasi ini dimanfaatkan oleh Moskow sebagai argumen untuk melindungi penduduk berbahasa Rusia atau berbahasa Rusia. Selain Krimea, etnis Rusia adalah minoritas, Ukraina mayoritas. Distribusi bahasa Ukraina dan Rusia di wilayah yang diminati berbeda dari pangsa kelompok etnis dalam arti bahwa bahasa Rusia dianggap jauh lebih sering diucapkan daripada bahasa Ukraina tentu saja berarti bahwa sejauh ini tidak semua orang yang sebagian besar menggunakan bahasa Rusia adalah etnis Rusia. Area yang dipertimbangkan untuk negara federal Novorossiia sebagian besar sesuai dengan yang bahkan Institut Sosiologi Internasional Kiev (KIIS) menyatakan dominasi Rusia yang jelas dan absolut sebagai "kode yang terutama digunakan" atas Ukraina.

## **B. Sejarah**

Rusia telah memanfaatkan kenangan nostalgia yang dimiliki banyak warga negara bekas republik Soviet atau negara satelit di era komunis, terutama dalam menghadapi situasi sosial ekonomi yang sulit yang dialami banyak warga. Aneksasi Krimea yang dilakukan Rusia bukan karena tanpa sebab hal ini dikarenakan Representasi transfer Crimea ke RSS Ukraina pada tahun 1954 dirasa sebagai 'kesalahan sejarah' hal ini juga digunakan sebagai argumen resmi Rusia karena penduduk di Krimea tidak dikonsultasikan selama pemindahan tahun 1954 ke Ukraina dan oleh karena

itu penduduk tidak terikat olehnya. (Myhre, Aasland, and Holm-Hansen 2022, 11).

Setelah perang Krimea 1918 diturunkan dari republik otonom menjadi oblast (wilayah) Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, dan pada tahun 1954 dipindahkan ke Ukraina untuk menandai peringatan 300 tahun Perjanjian Pereyaslav, tindakan yang dilakukan oleh rada (dewan) tentara Cossack di Ukraina untuk menyerahkan Ukraina ke pemerintahan Rusia. Pada tahun 1991 sekali lagi dijadikan republik otonom di dalam Uni Soviet, tetapi, dengan pembubaran resmi Uni Soviet pada bulan Desember tahun itu, Crimea diteruskan ke Ukraina yang baru merdeka. Hubungan antara Kiev dan Krimea adalah hubungan yang kompleks. Etnis Rusia merupakan mayoritas penduduk di Krimea, hal ini lah yang dimanfaatkan oleh Rusia dalam membangkitkan kenangan masa lalu dengan menggunakan dalih “Kembali ke negara Ibu” atau “Reuni”.

### **C. Produk Teknologi**

Teknologi sendiri tidak hanya berupa barang atau alat yang berwujud namun juga dapat tak berwujud seperti ilmu pengetahuan Kremlin yang mengejar strategi media pun dapat dikategorikan sebagai produk teknologi yang masuk kedalam teknologi informasi. Media dapat menjadi alat soft power karena selain meningkatkan daya tarik asli budaya pop Rusia dan acara TV apolitis kepada berbagai audiens domestik dan eksternal, strategi media Rusia telah memasukkan dosis propaganda yang kuat (Satter 2014, 29). Taktik propaganda yang digunakan baru-baru ini setelah aneksasi Krimea dan intervensi Rusia di wilayah timur Ukraina memiliki jejak tradisi

media era Soviet yang mencampurkan fakta dengan fiksi, mengarang 'kenyataan' dari 'ketidak nyataan' (Snyder 2010).

Untuk memajukan agenda medianya, Rusia telah memanfaatkan kontrol negara atas outlet media populer dan aksesibilitas saluran televisi negara Rusia ke pemirsa berbahasa Rusia di luar negeri. Saluran TV Rusia yang dikendalikan negara Rossiya, dan NTV dilaporkan menikmati popularitas yang lebih besar di Belarus dan Moldova daripada saluran TV domestik negara-negara tersebut. Selain media berbahasa Rusia yang tersedia di negara-negara pasca-Soviet, pemerintah Rusia mensponsori RT berbahasa Inggris, Spanyol, dan Arab mengklaim sebagai media yang paling banyak ditonton. saluran bahasa Russia Today (RT). saluran berita global di kota-kota besar dunia. Kontennya tersedia gratis di YouTube yang memudahkan orang diluar Rusia dapat dengan mudah masuk ke dalam propaganda rusia (Satter 2014).

Kremlin juga semakin mahir dalam melengkapi saluran media tradisional dengan media digital, mendukung sejumlah situs web pro-Kremlin. Pada saat yang sama, telah memperkenalkan langkah-langkah untuk membangun kontrol yang lebih besar atas konten Internet. Misalnya, pada Desember 2013 Kejaksaan Negara Rusia dan Layanan Federal untuk Pengawasan Telekomunikasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Massa memperoleh hak untuk memblokir situs web dengan konten yang 'ekstremis' (Jackson 2010).

### 3.1.2.2 Nilai Nilai Politik.

Instrumen selanjutnya adalah Political Values sebagai unsur *Attraction*, Political Values atau nilai nilai politik merupakan nilai yang dianut oleh pemerintah dalam berperilaku setiap hari, organisasi internasional dan dalam pengambilan kebijakan internasional Negara harus mampu untuk mengimplementasikan ide-ide politiknya untuk memperoleh pengakuan dari internasional. Apabila suatu negara ingin memainkan perannya dalam suatu agenda politik maka penting bagi negara tersebut untuk membangun dan mendominasi aturan-aturan internasional yang dapat mempengaruhi pilihan serta pemahaman dari negara lain mengenai kepentingan nasional negara tersebut. Dalam hal ini nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dapat menjadi *attraction* yang kuat (Nye 2004).

Pemerintah Rusia menggunakan konstruksi ancaman Ukraina dan kekacauan transisi pemerintahan untuk menegaskan kepentingan Rusia di Ukraina. Pada pagi hari tanggal 27 Februari, tentara berseragam hijau polos, dengan balaclava yang menutupi wajah mereka dan memiliki persenjataan canggih, muncul di seluruh semenanjung Krimea dan mengepung instalasi militer Ukraina yang seolah-olah untuk melindungi penduduk dari kekerasan yang akan datang yang akan diprakarsai oleh pemerintah Ukraina yang baru dan sekutu-sekutu sayap kanannya. Sikap mereka yang relatif tenang dan sopan, serta tidak adanya lencana, menambah daya pikat misterius pada kehadiran "pria hijau kecil" ini - sebuah istilah yang dilaporkan diciptakan oleh orang-orang Krimea dan dengan cepat digunakan secara luas di media dan di Internet untuk pasukan Rusia yang berseragam

tak bertanda (Shevchenko 2014). Pasukan ini memerankan apa yang disebut oleh antropolog Alexei Yurchak (2014) sebagai "teknologi politik non-okupasi," di mana pasukan militer anonim, yang konon tidak memiliki negara (meskipun "diakui oleh semua orang" sebagai pasukan Rusia) mencerminkan "visi ganda yang paradoksal" di mana pemerintah Rusia memandang Krimea sebagai bagian dari Ukraina dan pada saat yang sama merupakan wilayah yang terpisah, yang dianggap sebagai wilayah Rusia yang hilang. Tentu saja, semua orang langsung menyadari - dari peralatan dan aksesoris mereka - bahwa mereka adalah pasukan yang setidaknya mewakili kepentingan, jika tidak secara langsung diambil dari unit intelijen militer khusus Federasi Rusia. Hal ini terlepas dari pernyataan Presiden Putin yang terkenal bahwa pasukan ini adalah "unit pertahanan diri lokal" yang membeli seragam mereka dari toko-toko dan tidak menerima persenjataan dan pelatihan dari Rusia (Russia 2014).

### **3.1.2.3 Kebijakan Luar Negeri.**

Gereja Ortodoks Rusia juga merupakan pemain penting dalam soft power Kremlin, yang telah diklaim bahwa Gereja Ortodoks Rusia telah digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri Rusia, di antaranya mendorong separatisme di Krimea khususnya dalam mempromosikan nilai-nilai konservatif-patriotik di dalam negeri tetapi juga dalam menyebarkan gagasan tentang 'persaudaraan Ortodoks' di luar negeri. Pada tahun 2009 Patriark Ortodoks Rusia, Kirill, berpendapat:

*“Individually, even the largest countries of the Russian World would not be able to safeguard their spiritual, cultural and civilizational interests*

*in the face of globalization. I am confident that only an consolidated Russian World could become a powerful subject in global international politics, more powerful than any political alliances (Bogomolov and Lytvynenko 2012)”*

Pernyataan semacam itu telah membuat beberapa komentator melangkah lebih jauh dengan mengkarakterisasi upaya Rusia untuk memanfaatkan Ortodoksi untuk tujuan kebijakan dalam dan luar negerinya dalam upaya untuk mengembangkan 'analog modern Kekaisaran Romawi Suci' (Bogomolov and Lytvynenko 2012).

Untuk memahami hal ini, perlu melihat kembali sejarah secara singkat. Pada tahun 988, Pangeran Agung Kyiv, Volodymyr yang Agung, mengubah nama Kyiv dan kemudian seluruh wilayah Rus Kyivan. Keputusannya untuk melakukan hal itu didorong oleh keyakinan bahwa agama monoteistik akan menggabungkan kekuasaannya. Pilihannya diambil setelah Kaisar Bizantium, Basil II, meminta bantuannya untuk mengalahkan saingannya, Bardas Phocas. Volodymyr setuju untuk memberikan bantuan militer dengan syarat ia akan menikahi putri Basil II, Anna. Syarat ini disetujui dengan prasyarat bahwa Volodymyr harus mengubah dirinya, dan semua rakyatnya, menjadi Kristen Bizantium. Pada 1 Agustus 988, Rus Kyivan secara resmi dikristenkan. Tahun berikutnya, Volodymyr mengepung kota terbesar di wilayah Timur Laut Laut Hitam, kota Krasnodar di Krimea. Cherson adalah pusat manufaktur dan perdagangan yang penting, kurang dari 20 kilometer dari tempat yang sekarang disebut Sevastopol. Sejarah keagamaan yang menyatukan negara-



negara bekas Rus Kyivan saat ini terus menjadi sumber perdebatan dan instrumen politik bagi kebijakan luar negeri Rusia. Gereja Ortodoks Rusia mempromosikan gagasan bahwa Rusia memegang posisi sebagai Roma Ketiga dan terlebih lagi, Krimea adalah tempat lahir Ortodoksi Rusia dan oleh karena itu, orang-orang Belarusia, Rusia, dan Ukraina memiliki ikatan khusus. Gereja Ortodoks Rusia mempertahankan hubungan yang kuat dengan negara Rusia, dengan mengambil peran politik yang jauh melebihi misi keagamaan dan sosialnya, mengejar tujuan kebijakan luar negeri, terutama dalam konteks persaingan vertikal dan kebijakan anti-Euro-Atlantik di Ukraina. Gereja Ortodoks di bawah Patriarkat Rusia secara teratur mengorganisir demonstrasi dan pawai untuk menentang integrasi NATO dan Euro-Atlantik (Roslycky 2011).

### **3.2 Propaganda Rusia di Krimea Pra-Aneksasi.**

Setelah gagalnya kesepakatan dagang Ukraina dengan Uni Eropa yang tak lain dan tak bukan diduga kuat karena intervensi Rusia berupa dana talangan sekaligus kortingan harga gas, demonstrasi pun bergulir, mulai dari demonstrasi damai hingga aksi yang memakan korban, yang membuat tergulingnya Viktor Yanukovych dari jabatannya dan digantikan oleh pemerintahan yang baru. Penggelaran referendum 16 Maret menjadi puncak dari krisis Ukraina terkait pemisahan diri Krimea dan bergabungnya ke Rusia yang secara historis maupun faktual memiliki kedekatan dengan Rusia (Auliani 2014).

Pada hari Minggu, sebuah referendum di Krimea memutuskan nasib semenanjung itu. Segala upaya dilakukan Rusia untuk memenangkan perdebatan yang menguntungkan dengan Moskow yang membantu mendorong propaganda

dari belakang dengan versi “perang informasi” karena hanya dengan mematkan pers independen, Rusia mengontrol lebih banyak cerita; dengan menyebarkan setengah kebenaran dan desas-desus untuk mencapai kemenangan tanpa harus melepaskan tembakan (Yuhas 2014). Lalu apa saja propaganda yang dilakukan Rusia terhadap Krimea sebelum referendum 16 maret?

### 1. **Reklame referendum 16 Maret**

Propaganda sendiri adalah suatu rangkaian pesan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi tindakan seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini Rusia menggunakan propaganda untuk mempengaruhi tindakan Krimea dalam pengambilan keputusan terkait referendum Krimea pada 16 Maret yang mana salah satu propaganda yang dihasilkan Rusia untuk mempengaruhi Krimea dengan memasang papan reklame besar di jalan jalan terkait pemilihan referendum 16 maret sebagai bagian daripada penentuan nasib Krimea. Iklan referendum bermunculan di Krimea. Terdengar seperti pesan "16 Maret, kami memutuskan!" Pergi Rusia atau pergi Nazi? tidak hanya itu Di Krimea, salah satu dari dua stasiun TV yang diizinkan siaran terus mengulang klip yang menampilkan slogan "16 Maret: Bersama Rusia" sambil membunyikan lagu kebangsaan Rusia (LEONARD 2014).

Pada Gambar 2.2 hal tersebut tidak hanya reklame dengan kata “16 Maret kami memilih” dapat diketahui bahwasanya gambar dapat mewakili sebuah kata atau ekspresi atau dapat berupa sebuah metafora. Teks tertulis dapat memberikan makna kejutan pada gambar, dan makna teks tertulis dapat dirumuskan dalam konteks gambar.

Gambar 3.1 Reklame 16 Maret kami memilih



(Kuße 2018)

Reklame di atas memiliki pesan yang menunjukkan karakter aneksasi yang ilegal dan agresif, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1 Reklame itu menunjukkan dua peta Krimea: di sisi kiri semenanjung diwarnai merah pekat dengan swastika di atasnya ditutupi kawat berduri. Di sisi kanan Krimea memiliki warna bendera Rusia. Tajuk poster berisi frasa “Pada 16 Maret kami akan memilih ... atau,” sedangkan konjungsi alternatif (atau), yang ditempatkan di bagian bawah antara dua gambar Krimea, menandakan “diduduki oleh fasis” atau “dibebaskan oleh Rusia” (Kuße 2018, 40).

Kampanye referendum Krimea bergejolak, dengan munculnya reklame “kami memilih” yang secara tersirat menyatakan bahwa Ukraina dijalankan oleh Nazi, reklame tersebut dirumuskan sebagai berikut: “Jika kita ingin menghindari fasisme di Krimea, kita harus memilih Rusia”, reklame dengan peringatan ancaman Nazi seperti berbicara jika Krimea tetap berada di bawah kekuasaan Ukraina maka akan menjadi penjara fasis (Kuße 2018, 41). Reklame “kami memilih” dengan bendera Nazi dan Rusia didalamnya dimanfaatkan dalam propaganda karena selama berabad-abad Ukraina

memiliki reputasi sebagai salah satu pusat anti-Semitisme, banyak orang Ukraina mengambil bagian dalam genosida orang Yahudi selama Perang Dunia II. Pada hari pelaksanaan referendum, televisi lokal menayangkan film dokumenter panjang hitam putih tentang Nazi dalam Perang Dunia Kedua (Davidoff 2014).

Ketakutan terhadap fasis sangat berpengaruh di Ukraina, yang menderita dalam perang dunia kedua, tergulingnya presiden Ukraina yang pro Rusia yang dari jabatannya yaitu Viktor Yanukovych, dan digantikan presiden Arseniy Yatsenyuk Rusia kehilangan pemerintahan bersahabat dan merasa terancam akibat pemerintah yang baru tidak pro Rusia. Namun hal ini dimanfaatkan Rusia untuk mengubah citra revolusi pasca tergulingnya Viktor Yanukovych dengan mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Ukraina terhadap Viktor Yanukovych adalah kudeta fasis yang dilakukan kaum fasis untuk menunjukkan sikap permusuhan atau prasangka terhadap Rusia “Anti-semit” dan menuding barat karena mengatur dan mendukung para pelakunya (Yuhas 2014). Hal tersebut dikatakan Putin saat bertemu dengan perwakilan media untuk menjawab sejumlah pertanyaan mereka, khususnya terkait situasi di Ukraina. Ketika berbicara tentang Ukraina, Putin bersikeras bahwa Rusia akan memiliki kehadiran keamanan sampai situasinya "normal". Dengan mengandalkan ketakutan Ukraina terhadap kelompok fasis Rusia masuk wilayah teritorial Krimea dengan maksud “melindungi” dengan kehadiran “little green men” di Krimea, pasukan militer Rusia tanpa lencana hadir saat Demonstran Pro-Rusia dan Pro-Barat Bentrok di Ukraina (Shevchenko 2014)

## 2. Membungkam pers dan suara Independen

Setelah ricuhnya protes dari Pro Barat akibat pembatalan penandatanganan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa yang membuat Gerakan protes massa di Kyiv dan di tempat lain pada 21 November 2013 berlangsung. Kremlin Vladimir Putin tidak tinggal diam ia berusaha memanfaatkan media sebagai bagian dari propaganda nya dan membungkam suara pers yang tidak setuju akan kebijakannya. Pada hari pelaksanaan referendum, televisi lokal menayangkan film dokumenter panjang hitam putih tentang Nazi dalam Perang Dunia Kedua menandakan (Davidoff 2014).

Pada bulan Desember Vladimir Putin memerintahkan restrukturisasi kantor berita RIA Novosti di Rusia yang meskipun secara historis RIA Novosti independen namun pada kenyataannya RIA Novosti adalah milik negara. Restrukturisasi RIA Novosti berhasil terlaksana pada 9 November 2013 yang mana perubahannya terlihat mulai dari pemimpinnya yang fenomenal yaitu Dmitry Kiselev, salah satu penyiar paling terkenal di TV Rusia, yang dikenal karena pandangan anti-Barat dan homofobiknya yang ekstrim. Hingga sekecil tampak depan bagian gedung yang semula bertuliskan RIA Novosti menjadi Russia Today (Ennis 2013).

Tindakan melikuidasi RIA Novosti yang dilakukan tiba tiba juga terjadi dengan Voice of Russia salah satu stasiun radio internasional Kremlin yang ikut dilikuidasi oleh Vladimir Putin untuk nantinya akan direstrukturisasi dengan rencana Presiden Vladimir Putin yang akan mendirikan kantor berita internasional besar bernama Rossiya Segodnya, atau Russia Today, hal ini dilakukan untuk Vladimir Putin untuk mengirimkan informasi kepada



audiens asing tentang "kebijakan negara Federasi Rusia dan kehidupan publik di Rusia". Moskow memandang strategi ini signifikan sebagai langkah dalam strategi untuk mempengaruhi opini dunia (Ennis 2013).

Gambar 3.2 RIA Novosti sebelum Restrukturisasi



(Ennis 2013)

Gambar 3.3 RIA Novosti sesudah Restrukturisasi



(Ennis 2013)

RIA Novosti dan Voice of Russia hanyalah yang pertama, Dozhd (TV Rain) saluran TV independen yang melakukan jajak pendapat online, tentang apakah Soviet harus menyerahkan Leningrad selama perang dunia kedua untuk menyelamatkan ratusan ribu nyawa yang mana jajak pendapat itu

muncul pada peringatan 70 tahun pengepungan Leningrad, yang menewaskan 800.000 orang. TV Rain akhirnya ditarik mengudara dihentikan baik operator satelit dan kabel juga Kremlin menghapus pemirsa saluran tersebut tepat menjelang Olimpiade Sochi Musim Dingin berlangsung (Harding, Moskow, and Harding 2014).

Tidak berhenti di TV Rain stasiun radio Ekho Moskvyy yang direktornya semula Yuri Fedutinov sebagai direktur umum bertanggung jawab atas administrasi, periklanan, dan masalah komersial lainnya. Minggu ini dia digantikan oleh Yekaterina Pavlova, yang sebelumnya adalah produser dan editor radio dan TV milik negara Rusia Vesti TV sebelum pindah ke Voice of Russia. rapat pemegang saham telah memecat CEO Ekho Mosvky Yury Fedutinov, yang mengelola stasiun radio tersebut sejak 1992 Hal ini dilakukan oleh Gazprom Media, anak perusahaan raksasa minyak milik negara. Saat pemilihan Venediktov kembali karena Fedutinov Menyinggung pemilu Rusia yang dianggap curang oleh beberapa kritikus, Venediktov mengatakan dalam pesan Twitter bahwa hasilnya “91 persen suara” lebih baik daripada Presiden Vladimir Putin, tetapi tertinggal dari pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov (Dolgov 2014).



Gambar 3.4 Host Russia Today, Abby Martin



(The Guardian 2014)

Tidak cukup pada kantor berita, dan saluran radio, Vladimir Putin pun membungkam suara independen. Hal ini terjadi pada Abby Martin jurnalis Amerika yang bekerja untuk Russia Today setelah menutup acaranya “*Breaking the Set*” pada 3 Maret 2014 dengan pernyataan singkat “what Russia did is wrong and that military intervention was never the answer.” Abby Martin pun menambahkan bahwasanya dari semua sisi spektrum media tentang Ukraina penuh dengan disinformasi. Russia Today sebagai kantor berita naungan dari Abby Martin sendiri segera memberi pernyataan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abby adalah murni pendapat pribadi Abby Martin dan tidak ada sedikitpun paksaan, Russia Today pun menambahkan bahwasanya hak setiap jurnalis untuk berbeda pendapat dan bagi Abby yang juga berkomentar bahwa dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang realitas situasi di Krimea. Karena itu Russia Today akan mengirimnya ke Krimea untuk memberinya kesempatan mengambil keputusan sendiri dari pusat. Namun Abby Martin membuat putusan tegas

bahwasanya ia tidak akan pergi ke Krimea meskipun Russia Today telah memberikan pernyataannya (*The Guardian* 2014).

### **3. Distribusi paspor Rusia di Krimea**

Propaganda Rusia dalam pembangunan Institusi paling signifikan adalah upaya "pasporisasi" Moskow, yang merupakan distribusi sistemik paspor dan kewarganegaraan Rusia. Pasporisasi Krimea merupakan cerminan dari keberhasilan Soft Power Rusia dan kebijakan rekan senegarannya di semenanjung dan di bagian lain Ukraina. Penggunaan paspor sebagai instrumen penerahan kekuasaan adalah contoh dari perkembangan otoriter baru, karena penggunaannya dapat masuk ke dalam sebuah metode yang digunakan negara untuk 'merangkul' penduduknya. Rusia yang ingin melindungi rekan senegarannya dengan mengusulkan pasporisasi sebagai metode kontrol yang paling efektif yang dimiliki negara atas rakyat dan warga negaranya. Distribusi paspor Rusia di Krimea pada 18 Maret 2014 yang dimulai dalam skala besar selain menjadi dokumen utama yang memfasilitasi perjalanan, paspor adalah buku yang sangat simbolis yang menandakan identitas nasional dan milik negara (Salter 2004, 72).

Strategi pasporisasi yang digunakan oleh Rusia di Krimea bergantung pada sifat asosiatif dari hubungan tersebut, yang terjalin selama hubungan di masa Soviet dan upaya yang lebih disengaja untuk menegaskan pengaruh. Tanpa hubungan yang terbentuk selama keberadaan Uni Soviet, naturalisasi warga negara non-Rusia yang dipercepat dan disederhanakan, dan distribusi paspor Rusia kepada warga negara ini akan jauh lebih mudah. Penduduk Krimea tampaknya menyambut baik tawaran paspor Rusia, dengan beberapa

mengantri sepanjang hari untuk mencapai pusat imigrasi adhoc Rusia yang ditempatkan di seberang semenanjung (Wrighton 2018, 2). Untuk memahami bagaimana fungsi kooptasi rakyat Krimea yang populer di Rusia, mengutip dalam (Wrighton 2018, 7) penduduk krimea rela mengantri untuk mendapatkan paspor Rusia karena janji-janji Rusia tentang peningkatan keamanan finansial sebagai alasan utama untuk menerima pemberian kewarganegaraan Rusia dan penerimaan paspor mereka, sementara yang lain mengakui bahwa mereka yakin paspor Rusia akan memungkinkan peluang kerja dan mobilitas yang lebih besar baik di Krimea (Wrighton 2018, 8).

Aspek dari strategi pasporisasi adalah efek legitimasi yang potensial terhadap kehadiran negara Rusia di Krimea. Distribusi dokumentasi resmi kepada penduduk adalah fungsi administrasi dan birokrasi negara yang mendasar. Dengan melakukan fungsi ini, yang biasanya dilakukan oleh otoritas yang mapan kepada warganya, Federasi Rusia tidak dapat disangkal bertindak sebagai otoritas de facto bahkan jika posisi de jure ditentang. Proses ini memiliki potensi yang jelas untuk melegitimasi kehadiran Rusia di Krimea, karena hubungan antara otoritas Rusia dan Krimea terwujud secara nyata dalam bentuk pelabuhan lintas. Fakta bahwa Federasi Rusia memiliki kapasitas untuk mendistribusikan paspornya kepada penduduk Krimea dapat melegitimasi kehadirannya sebagai otoritas operatif. Inti dari kemampuan melegitimasi strategi pasportizatsiya Rusia terletak pada klaim nyata dan simbolis kepada orang-orang yang dimungkinkan oleh penerbitan paspor kepada penduduk. Tanpa dokumen ini, Rusia tidak akan dapat memasukkan Krimea ke dalam pemerintahan mereka secara komprehensif dan sederhana.

Pada Juni 2014, lebih dari satu juta paspor Rusia telah diterbitkan dan sekitar 1,25 juta aplikasi diajukan (Wrighton 2018, 9)

#### **4. Media Sosial sebagai alat manipulasi Rusia**

Penggunaan media sosial terus meningkat di seluruh dunia, dengan Facebook mengaku memiliki populasi pengguna aktif sebanyak 1,6 miliar orang, populasi yang lebih besar dari negara mana pun di planet ini. Pada titik ini, mereka yang ingin memanipulasi acara dapat menggunakan media sosial untuk membentuk narasi bagi audiens yang ditargetkan untuk mencapai efek yang diinginkan. Manipulasi ini dapat mengajak orang lain untuk bertindak, memecah belah populasi, atau mempengaruhi opini terhadap upaya AS atau koalisi. Dunia melihat keefektifan serangan dunia maya sosial semacam itu selama aneksasi Krimea oleh Rusia tahun 2014 (Holloway 2017).

Selama aneksasi Krimea tahun 2014, Mereka bermaksud mempengaruhi opini publik dan internasional, membanjiri suara para pembangkang secara online, dan menciptakan citra populasi yang mendukung aneksasi. Untuk mencapai hal ini, penyerang dunia maya sosial mengimbau penduduk Krimea yang pro-Rusia dengan menyebarkan desas-desus kebencian dan ketakutan. Salah satu desas-desus tersebut melibatkan penyaliban seorang anak berusia tiga tahun di alun-alun umum Slovyansk oleh tentara Ukraina, Channel One TV menyiarkan cuplikan seorang wanita yang mengatakan dia melihat tentara Ukraina mengumpulkan orang-orang di Slavyansk tengah, yang direbut kembali oleh tentara bulan ini setelah tiga bulan bentrokan dengan separatis, dan menyalibkan seorang anak pemberontak ke papan pengumuman. Yang mana setelah berita ini naik media

sosial ramai akan kutukan terlepas dari kepalsuan cerita ini, orang-orang mempercayainya karena menyebar di antara penduduk. Para pendukung aneksasi menerima cerita ini sebagai kebenaran karena menarik bias mereka terhadap pasukan Ukraina di daerah tersebut (Nemtsova 2014).

Penyerang dunia maya pro-Rusia merilis beberapa cerita serupa dalam upaya untuk lebih mempolarisasi populasi di Krimea, kisah seorang dokter darurat bernama Igor Rosovsky di epicentrum kekerasan Odessa Mei 2014 yang menyatakan bahwa pendukung Ukraina menyerang nasionalis Krimea dan membakar mereka hidup-hidup. Ketika "Igor" berusaha untuk memperlakukan baik kaum nasionalis, para pejuang Ukraina menghentikannya dan melontarkan komentar anti-Semit yang meremehkannya. Posting Facebook ini menyebar dengan cepat di antara situs media sosial Rusia seperti *Vkontakte*, di mana pengguna berbagi cerita 5.000 kali dalam 24 jam. Sekali lagi, para analis Barat menyanggah kisah ini, namun seperti penyaliban seorang anak di Slovyansk posting media sosial itu tampaknya sengaja disebarluaskan untuk memanipulasi orang di timur Ukraina dan sekitarnya. Selama Mei 2014 kekerasan di Odessa, seseorang memposting yang berikut ke Facebook (Schreck 2014):

“[Versi bahasa Indonesia] Halo. Nama saya Igor Rosovskiy. Saya berumur 39 tahun. Saya tinggal di kota Odessa. Saya telah bekerja sebagai dokter darurat selama 15 tahun. Kemarin, yang perlu kalian ketahui, terjadi tragedi yang mengerikan di kota kami, beberapa orang membunuh orang lain. Mereka membunuh mereka dengan cara yang brutal dengan membakar mereka hidup-hidup, bukan dalam keadaan

mabuk, bukan untuk mendapatkan warisan nenek mereka, tetapi karena mereka memiliki pandangan politik nasionalis. Pertama, mereka memukuli korbannya secara brutal, lalu membakarnya hidup-hidup. Sebagai seorang dokter, saya bergegas membantu mereka yang bisa saya selamatkan, tetapi para pejuang menghentikan saya. Mereka tidak membiarkan saya pergi ke yang terluka. Seseorang dengan kasar mendorong saya, berjanji bahwa saya dan orang Yahudi lainnya akan mengalami nasib yang sama. Saya melihat seorang pria muda yang bisa saya selamatkan jika saya bisa membawanya ke rumah sakit, tetapi upaya persuasi saya bertemu dengan pukulan di wajah dan kehilangan kacamata. Dalam lima belas tahun saya telah melihat banyak hal, tetapi kemarin saya ingin menangis, bukan karena pukulan dan penghinaan, tetapi karena ketidakberdayaan saya karena tidak dapat melakukan apapun. Di kota saya, hal seperti itu tidak terjadi bahkan selama masa terburuk pendudukan Nazi. Saya bertanya-tanya mengapa dunia ini sunyi (Lange-Ionatamishvili 2015, 108).’

*Gambar 3.5 Halaman Facebook Igor Rozovsk*



(Schreck 2014)



Terlepas dari ketidakabsahan cerita semacam itu, platform media sosial memungkinkan pesan menjangkau jutaan orang lebih cepat dari sebelumnya. Tingkat interaksi pada platform ini bervariasi dari dua hingga 70 interaksi per postingan per 1.000 pengguna. Bagi mereka yang mencoba membentuk narasi, platform ini adalah salah satu cara tercepat untuk menyebarkan desas-desus dan menimbulkan ketakutan atau kebencian terhadap oposisi mereka (Schreck 2014).





## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Strategi kekuatan lunak Rusia adalah tema yang relatif baru dalam literatur akademik dan masih kurang diteliti. Kremlin adalah aktor soft power utama di Rusia, memperkuat kesan bahwa soft power Rusia sebagian besar adalah propaganda ala Soviet untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri Moskow. Beberapa kategori yang menangani topik ini dapat diidentifikasi. Pertama, beberapa penelitian, terutama yang bersifat historis, telah berfokus pada dugaan kesinambungan strategi soft power Rusia saat ini dengan propaganda tipe Soviet atau bahkan kebijakan luar negeri pra-revolusioner Rusia (Tsygankov 2013).

Berpacu pada kerangka pemikiran penulis yang menggunakan instrumen *agenda setting* dan *attraction* sebagai alat untuk menuju kooptasi dari soft power itu sendiri. Pada variabel *agenda setting* dijelaskan bahwasanya kegagalan agenda politik Ukraina terkait penghapusan bahasa Rusia dengan menyebar desas desus terkait ancaman identitas di Ukraina sengaja dilakukan oleh Rusia dalam memenangkan agenda politiknya sendiri akibat dari kehilangan pemerintahan yang bersahabat setelah turunnya Yanukovich dari jabatannya.

Lalu pada variabel kedua yaitu *attraction* yang mana memiliki 3 *resources* budaya, nilai politik juga Kebijakan Luar negeri. Pertama melalui budaya fakta Krimea yang pernah berada dibawah kepemimpinan Catherine The Great sebagai sejarah masa lalu digunakan kembali oleh Rusia untuk mendapatkan hati Krimea dalam pengembalian Krimea ke ibu Rusia, lalu ada fakta terkait hegemoni bahasa Rusia yang sering kali digunakan Rusia dalam strategi soft powernya karena

Krimea memiliki mayoritas berbahasa Rusia membuat putin ingin menjaga rekan senegarannya. Kedua, nilai nilai politik yang digunakan putin dengan menaruh *little green men* di semenanjung Krimea untuk menjaga Krimea daripada ancaman Ukraina yang mana pada saat itu Krimea ingin berpartisipasi pada referendum 16 Maret. Ketiga ada kebijakan luar negeri Rusia melalui Ortodoksi yang sangat terkenal sebagai instrumen kebijakan luar negeri Rusia, di antaranya mendorong separatisme di Krimea khususnya dalam mempromosikan nilai-nilai konservatif-patriotik di dalam negeri tetapi juga dalam menyebarkan gagasan tentang 'persaudaraan Ortodoks' di luar negeri.

#### **4.2 Saran**

Penulis sadar bahwasanya penulisan dan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Harapannya penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber acuan atau referensi bagi para peneliti, penulis, atau pun akademisi di masa yang akan datang. Terutama bagi mereka yang memiliki fokus di isu propaganda Rusia atau Soft Power. Melalui penelitian ini diharapkan ada variabel yang berbeda untuk diteliti. Saran untuk perubahan fokus penelitian menjadi Krimea sebagai penerima konsep Soft Power, Atau saran untuk perubahan metode penelitian menggunakan Konsep Smart Power sebagai kemampuan dalam menggabungkan Hard Power dan Soft Power.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambrosio, Thomas. 2016. "The Rhetoric of Irredentism: The Russian Federation's Perception Management Campaign and the Annexation of Crimea." *Small Wars & Insurgencies* 27 (3): 467–90.  
<https://doi.org/10.1080/09592318.2016.1151653>.
- Auliani, Palupi Annisa. 2014. "Putin Tanda Tangani Dekrit Akui Referendum Crimea." KOMPAS.com. March 17, 2014.  
<https://internasional.kompas.com/read/xml/2014/03/18/0200189/Putin.Tanda.Tangani.Dekrit.Akui.Referendum.Crimea>.
- "Autonomous Republic of Crimea." n.d. Accessed March 14, 2023.  
<https://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/arc.htm>.
- BBC News Indonesia. 2018. "Rusia tembak dan tahan tiga kapal Ukraina, ketegangan meningkat," November 26, 2018.  
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46339585>.
- Bebler, Anton. 2015. "Crimea and the Ukrainian-Russian Conflict." In *"Frozen Conflicts" in Europe*, edited by Anton Bebler, 1st ed., 189–208. Verlag Barbara Budrich. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvdf0bmg.22>.
- Biersack, John, and Shannon O'Lear. 2014. "The Geopolitics of Russia's Annexation of Crimea: Narratives, Identity, Silences, and Energy." *Eurasian Geography and Economics* 55 (3): 247–69.  
<https://doi.org/10.1080/15387216.2014.985241>.
- Bogomolov, Alexander, and Oleksandr Lytvynenko. 2012. "A Ghost in the Mirror: Russian Soft Power in Ukraine," January.  
[https://www.researchgate.net/publication/263853878\\_A\\_Ghost\\_in\\_the\\_Mirror\\_Russian\\_Soft\\_Power\\_in\\_Ukraine\\_The\\_Aims\\_and\\_Means\\_of\\_Russian\\_Influence\\_Abroad\\_Series\\_A\\_Ghost\\_in\\_the\\_Mirror\\_Russian\\_Soft\\_Power\\_in\\_Ukraine](https://www.researchgate.net/publication/263853878_A_Ghost_in_the_Mirror_Russian_Soft_Power_in_Ukraine_The_Aims_and_Means_of_Russian_Influence_Abroad_Series_A_Ghost_in_the_Mirror_Russian_Soft_Power_in_Ukraine).
- Calamur, Krishnadev. 2014. "Crimea: A Gift To Ukraine Becomes A Political Flash Point." *NPR*, February 27, 2014, sec. International.  
<https://www.npr.org/sections/parallels/2014/02/27/283481587/crimea-a-gift-to-ukraine-becomes-a-political-flash-point>.
- Davidoff, Victor. 2014. "Putin's Fabricated Anti-Semitism in Ukraine." *The Moscow Times*. April 13, 2014.

<https://www.themoscowtimes.com/2014/04/13/putins-fabricated-anti-semitism-in-ukraine-a33893>.

Dolgov, Anna. 2014. "Long-Standing Editor Re-Elected at Ekho Moskvyy." *The Moscow Times*. March 4, 2014.

<https://www.themoscowtimes.com/2014/03/04/long-standing-editor-re-elected-at-ekho-moskvyy-a32678>.

Ennis, Stephen. 2013. "Putin's RIA Novosti revamp prompts propaganda fears." *BBC News*, December 9, 2013, sec. Europe.

<https://www.bbc.com/news/world-europe-25309139>.

Estévez, Margarita Calvo. 2022. "La Península de Crimea; un enclave geopolítico en el Mar Negro." *Historia Digital* 22 (40): 1–4.

Harding, Luke, Luke Harding dan agensi di Moskow, and Luke Harding. 2014. "Russian News Channel TV Rain May Close after Main Carrier Pulls Plug." *The Guardian*, February 4, 2014, sec. World news.

<https://www.theguardian.com/world/2014/feb/04/russian-news-channel-tv-rain>.

Holloway, Michael. 2017. "How Russia Weaponized Social Media in Crimea."

The Strategy Bridge. May 10, 2017. <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/5/10/how-russia-weaponized-social-media-in-crimea>.

Hopf, Ted. 2016. "'Crimea Is Ours': A Discursive History." *International*

*Relations* 30 (2): 227–55. <https://doi.org/10.1177/0047117816645646>.

Interfax-Ukraine. 2012. "Language Law Comes into Force in Ukraine." Get the Latest Ukraine News Today - KyivPost. August 10, 2012.

<https://www.kyivpost.com/post/9577>.

Jackson, Nicole J. 2010. "The Role of External Factors in Advancing Non-Liberal Democratic Forms of Political Rule: A Case Study of Russia's Influence on Central Asian Regimes." *Contemporary Politics* 16 (1): 101–18. <https://doi.org/10.1080/13569771003593920>.

Kartini, Indriana. 2014. "ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA DAN KONSEKUENSI BAGI UKRAINA." *Penelitian Politik* 11: 27–41.

Kramer, Andrew E. 2014. "Ukraine Turns to Its Oligarchs for Political Help." *The New York Times*, March 2, 2014, sec. World.

<https://www.nytimes.com/2014/03/03/world/europe/ukraine-turns-to-its-oligarchs-for-political-help.html>.

Kuße, Holger. 2018. "Argumentation and Aggression: About Maps and Poems in the Russian-Ukrainian Conflict." *East/West: Journal of Ukrainian Studies* 5 (2): 37–63. <https://doi.org/10.21226/ewjus418>.

Lange-Ionatamishvili, Elina. 2015. "Strategic Communications and Social Media in the Russia Ukraine Conflict." [https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ch12\\_CyberWarinPerspective\\_LangeSvetoka.pdf](https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ch12_CyberWarinPerspective_LangeSvetoka.pdf).

Lankina, Tomila, and Kinga Niemczyk. 2015. "Russia's Foreign Policy and Soft Power." In *Russia's Foreign Policy*, edited by David Cadier and Margot Light, 97–113. London: Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/9781137468888\\_7](https://doi.org/10.1057/9781137468888_7).

LEONARD, PETER. 2014. "Russian propaganda war in full swing over Ukraine." April 15, 2014. <http://www.timesofisrael.com/russian-propaganda-war-in-full-swing-over-ukraine/>.

Minicozzi-Wheeland, Lucy. 2022. "Russia's Annexation of Crimea." *The Kyiv Independent*. December 14, 2022. <https://kyivindependent.com/explaining-ukraine/russias-annexation-of-crimea>.

Mizrokhi, Elena. 2009. "Russian 'Separatism' in Crimea and NATO: Ukraine's Big Hope, Russia's Grand Gamble." *Chaire de Recherche Du Canada*.

Moser, Michael. 2013. *Language Policy and Discourse on Languages in Ukraine Under President Viktor Yanukovich: (25 February 2010–28 October 2012)*. ibidem Press.

Myhre, Marthe Handå, Aadne Aasland, and Jørn Holm-Hansen. 2022. "'Crimea Will Forever Be Russian': Dissenting Norwegian Media Discourses on Russia's Annexation of Crimea." *European Politics and Society* 0 (0): 1–24. <https://doi.org/10.1080/23745118.2022.2103286>.

Nemtsova, Anna. 2014. "There's No Evidence the Ukrainian Army Crucified a Child in Slovyansk." *The Daily Beast*, July 15, 2014, sec. world. <https://www.thedailybeast.com/articles/2014/07/15/there-s-no-evidence-the-ukrainian-army-crucified-a-child-in-slovyansk>.

- Nye, Joseph S. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. 1st ed. New York: Public Affairs.
- Popovici, Alice. 2022. "How Crimea's Complex History With Russia Dates Back to the 19th Century." HISTORY. January 24, 2022.  
<https://www.history.com/news/crimea-russia-ukraine-annexation>.
- Pravda Ukraine. 2014. "Турчинов пообіцяв поки не скасовувати закон про мови нацменшин." Українська правда. March 3, 2014.  
<https://www.pravda.com.ua/news/2014/03/3/7017381/>.
- Roslycky, Lada L. 2011. "Russia's Smart Power in Crimea: Sowing the Seeds of Trust." *Southeast European and Black Sea Studies* 11 (3): 299–316.  
<https://doi.org/10.1080/14683857.2011.590313>.
- Russia, Team of the Official Website of the President of. 2014. "Direct Line with Vladimir Putin." President of Russia. April 22, 2014.  
<http://en.kremlin.ru/events/president/news/20796>.
- Salter, Mark B. 2004. "Passports, Mobility, and Security: How Smart Can the Border Be?" *International Studies Perspectives* 5 (1): 71–91.  
<https://doi.org/10.1111/j.1528-3577.2004.00158.x>.
- Salushev, Sergey. 2014. "Annexation of Crimea: Causes, Analysis & Global Implications," 11.
- Satter, David. 2014. "The Last Gasp of Empire: Russia's Attempts to Control the Media in the Former Soviet Republics," January.  
[https://www.cima.ned.org/publication/the\\_last\\_gasp\\_of\\_empire\\_russia\\_s\\_attempts\\_to\\_control\\_the\\_media\\_in\\_the\\_former\\_soviet\\_republics/](https://www.cima.ned.org/publication/the_last_gasp_of_empire_russia_s_attempts_to_control_the_media_in_the_former_soviet_republics/).
- Schreck, Carl. 2014. "Claims Of Odesa Atrocities, Anti-Semitism Face Scrutiny." *Radio Free Europe/Radio Liberty*, May 4, 2014, sec. Ukraine Unspun.  
<https://www.rferl.org/a/ukraine-unspun-odesa-doctor-dentist-false-claim/25372684.html>.
- Schulze, Jennie L. 2021. "Re-Framing Russia's Soft Power in Post-Accession Latvia: Education Reform and Naturalization for Stateless Children." *Eurasian Geography and Economics* 62 (3): 264–92.  
<https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1855997>.
- Shevchenko, Vitaly. 2014. "'Little Green Men' or 'Russian Invaders'?" - BBC



News.” March 1, 2014. <https://www.bbc.com/news/world-europe-26532154>.

Snyder, Timothy. 2010. “A Fascist Hero in Democratic Kiev | Timothy Snyder.” The New York Review of Books. February 24, 2010. <https://www.nybooks.com/online/2010/02/24/a-fascist-hero-in-democratic-kiev/>.

Solchanyk, Roman. 1994. “The Politics of State Building: Centre-Periphery Relations in Post-Soviet Ukraine.” *Europe-Asia Studies* 46 (1): 47–68.

Tafuro, Eleonora. 2014. “Fatal Attraction? Russia’s Soft Power in Its Neighbourhood.” *FATAL ATTRACTION*.

Teper, Yuri. 2016. “Official Russian Identity Discourse in Light of the Annexation of Crimea: National or Imperial?” *Post-Soviet Affairs* 32 (4): 378–96. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2015.1076959>.

*The Guardian*. 2014. “Russia Today Presenter Hits out at Moscow over Ukraine,” March 5, 2014, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2014/mar/05/russia-today-abby-martin-crimea-ukraine>.

Treisman, Daniel. 2016. “Why Putin Took Crimea: The Gambler in the Kremlin.” *Foreign Affairs* 95 (3): 47–54.

Tsygankov, Andrei P. 2006. “If Not by Tanks, Then by Banks? The Role of Soft Power in Putin’s Foreign Policy.” *Europe-Asia Studies* 58 (7): 1079–99. <https://doi.org/10.1080/09668130600926355>.

———. 2013. “Moscow’s Soft Power Strategy.” *Current History* 112 (756): 259–64. <https://doi.org/10.1525/curh.2013.112.756.259>.

USC Annenberg, dir. 2019. *Joseph Nye on the Future of Soft Power and Public Diplomacy*. <https://www.youtube.com/watch?v=q75uTqz5XS4>.

Vahabov, Tamerlan. 2010. “Ukraine: A Challenge for U.s., Eu & Nato Regional Policy.” *Caucasian Review of International Affairs* 4 (3): 297–305.

VOA News, V. O. A. 2014. “Crimea Applies to Join Russia.” VOA. March 17, 2014. <https://www.voanews.com/a/voting-under-way-in-crimea-referendum-to-join-russia/1872380.html>.



Wrighton, Sam. 2018. "Authoritarian Regime Stabilization through Legitimation, Popular Co-Optation, and Exclusion: Russian *Pasportizatsiya* Strategies in Crimea." *Globalizations* 15 (2): 283–300.

<https://doi.org/10.1080/14747731.2017.1396798>.

Yuhas, Alan. 2014. "Russian Propaganda over Crimea and the Ukraine: How Does It Work?" *The Guardian*, March 17, 2014, sec. World news.

<https://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/crimea-crisis-russia-propaganda-media>.

